

Laporan Riset

# Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2025



# Daftar isi

## 01. Pengantar

## 02. Latar Belakang

- Pertanyaan Riset
- Metode Riset
- Profil Narasumber
- Metode Penggalan Data
- Metode Pengolahan Data
- Metode Penilaian

## 03. Hasil Riset

## 04. Kesimpulan dan Rekomendasi

01

# Pengantar

# Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmatNya, laporan riset IndoStrategi yang berjudul “Laporan Riset Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran pada tahun pertama masa jabatannya. Evaluasi kinerja didasarkan pada program prioritas kementerian dan bukan pada kinerja pribadi menteri. Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan politik, ekonomi, hukum, pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga program-program unggulan pemerintah.

Riset ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintah dan kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, riset ini juga mengukur respons publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terhadap berbagai tuntutan reformasi yang muncul dari masyarakat.

## Pengantar

Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi di Indonesia, para ahli dari berbagai bidang, serta data sekunder dari berbagai media terpercaya.

Riset berlangsung pada bulan September hingga Oktober 2025. Di tengah pelaksanaan riset, yakni pada 8 September 2025, Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet. Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, diganti oleh Djamari Chaniago, dan Erick Thohir digeser posisinya dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada saat yang bersamaan, Presiden Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Dengan perubahan tersebut, maka riset ini tidak mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN yang nama dan statusnya kini berubah menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN maupun Kementerian Haji dan Umrah yang belum lama berdiri.

## Pengantar

Secara umum, hasil riset menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada kategori “sedang” dengan skor rata-rata 3,07 (dari skala 0–5). Dari berbagai aspek yang dinilai, pemberantasan korupsi memperoleh skor relatif tertinggi (3,50), sedangkan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu aspek terendah (2,65).

Di antara program prioritas, Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjadi program dengan penilaian terbaik (3,42), diikuti program Sekolah Rakyat (3,13). Sementara itu, penilaian terhadap lembaga negara menunjukkan bahwa publik puas terhadap tindakan partai politik dalam menonaktifkan anggotanya yang dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat dan tindakan presiden mengganti beberapa anggota kabinet.

Dari sisi kinerja kementerian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat skor tertinggi (3,35), diikuti Kementerian Luar Negeri (3,32) dan Kementerian Agama (3,26). Sebaliknya, beberapa kementerian seperti ESDM, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta HAM mencatat skor yang relatif rendah. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam reformasi birokrasi, transparansi kebijakan, serta pemerataan pembangunan.

## Pengantar

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan rujukan objektif bagi pemerintah, pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, maupun masyarakat luas dalam memahami capaian serta tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam satu tahun pertama masa kepemimpinannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim peneliti, narasumber, para ahli, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusinya dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan riset dan publikasi di masa mendatang.

**Ali Noer Zaman**

Direktur Riset



02

## Latar Belakang

## Latar Belakang

Pada tanggal 20 Oktober 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun. Periode tersebut dirasa cukup untuk menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta masing-masing kementerian. Apalagi, menjelang waktu setahun tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada berbagai persoalan seperti demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia dan penjarahan terhadap rumah beberapa anggota DPR yang dianggap tidak sensitif dan aspiratif terhadap rakyat. Para demonstran mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan 17+8 yang berisikan hal-hal seperti reformasi struktural yang lebih luas, reformasi DPR, revisi undang-undang perpajakan dan anti-korupsi, reformasi kepolisian, menghapus peran militer dalam jabatan sipil, dan penguatan lembaga hak asasi manusia.

## Latar Belakang

Beberapa partai politik telah merespons tuntutan tersebut dengan menonaktifkan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif pada keadaan rakyat seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya-Kuya), Eko Hendro Utomo (Eko Patrio), dan Adies Kadir, serta berjanji mendukung kebijakan yang lain seperti Percepatan Pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Di pihak pemerintah, Presiden Prabowo telah mengganti beberapa menteri dan menjanjikan beberapa perubahan yang lain.

Riset ini ingin melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun dan respons publik terhadap kebijakan dan tindakan politik pemerintah menghadapi tuntutan 17+8 yang banyak disuarakan oleh rakyat. Evaluasi juga dilakukan terhadap program prioritas setiap kementerian.

# Pertanyaan Riset

**02.**

Bagaimanakah kinerja kementerian dalam Kabinet Prabowo–Gibran dilihat dari pencapaian program prioritas di masing-masing kementerian?

**01.**

Bagaimana kinerja masing-masing pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun ini?

**03.**

Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan kinerja para menteri di masa mendatang?

# Metode Riset

Riset evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dari narasumber yang dipilih secara purposif di 34 Provinsi. Jumlah total narasumber adalah 424 orang. Mereka dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1), dan telah memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah, karyawan swasta, aktivis, guru, pengusaha, atau mereka yang sedang studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3). Pemilihan narasumber juga mempertimbangkan proporsi jenis kelamin dan agama.

Selain itu, riset juga mendasarkan diri pada sumber-sumber berita baik *online* maupun *offline*, dokumen pemerintah dan analisis para pengamat/akademisi.

Sumber informasi lain adalah 10 orang ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang memberikan informasi, pandangan, dan masukan atas data yang telah terkumpul dalam sebuah Diskusi Kelompok Terpumpun.

# Profil Narasumber

**424**



Total Narasumber

**34**

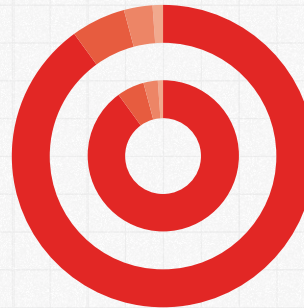
Provinsi se-Indonesia





## Jenis Kelamin



 Laki-laki **51%**  
 Perempuan **49%**

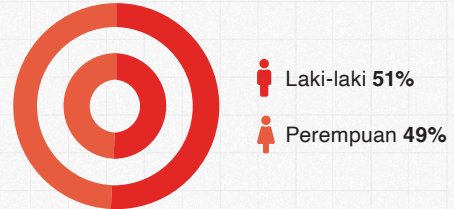
## Agama



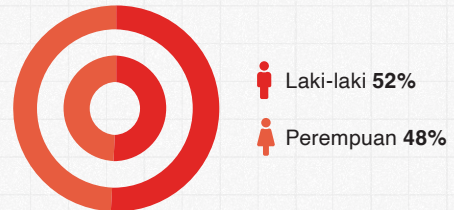
 Islam **91%**  
 Kristen/Protestan **6%**  
 Katolik **3%**  
 Hindu **1%**

## Data Sebaran Demografi

### Pulau Sumatra

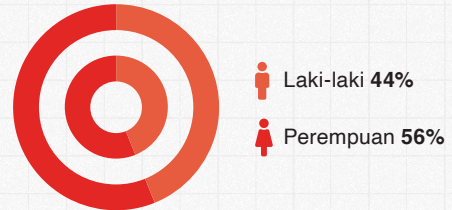


### Pulau Jawa dan Bali

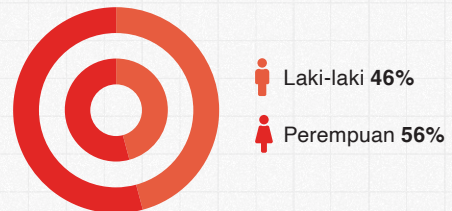
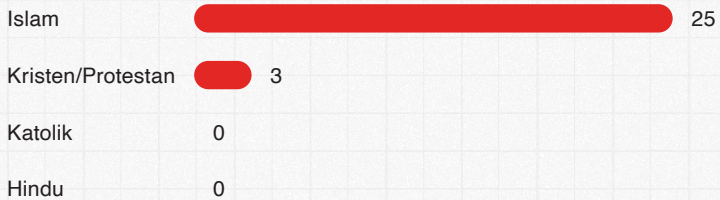


## Data Sebaran Demografi

### Pulau Kalimantan

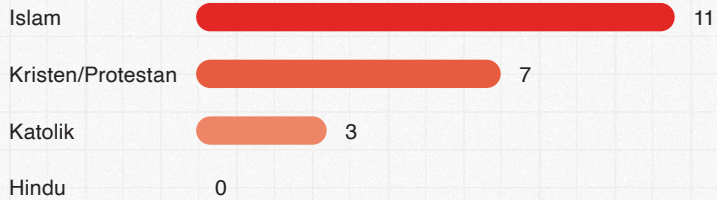


### Pulau Sulawesi



## Data Sebaran Demografi

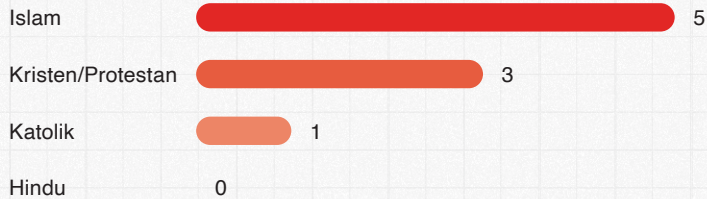
### Nusa Tenggara dan Maluku



 Laki-laki 52%

 Perempuan 48%

### Papua



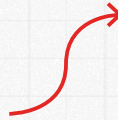
 Laki-laki 52%

 Perempuan 48%

# Metode Penggalan Data

**01.**

Mengirimkan pertanyaan pilihan tertutup (skala likert) dan pertanyaan terbuka sebagai sarana menggali pandangan yang lebih mendalam dari narasumber.



**02.**

Mengundang para ahli berbagai latar belakang dalam sebuah forum diskusi kelompok terpusat.

# Metode Pengolahan Data

Semua data kuantitatif ditafsirkan secara deskriptif frekuensi untuk mendapat nilai rata-rata, sedangkan data kualitatif diklasifikasi berdasarkan tema dan selanjutnya diinterpretasi. Data yang terkumpul kemudian divalidasi dengan informasi dari berita dan pandangan para narasumber melalui diskusi kelompok terpumpun, sehingga bisa menghasilkan data akhir yang valid. Dalam mengolah data, kami memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

## Metode Penilaian

**0,00 – 2,00**  
**Kinerja Buruk**



**2,01 – 4,00**  
**Kinerja Sedang**



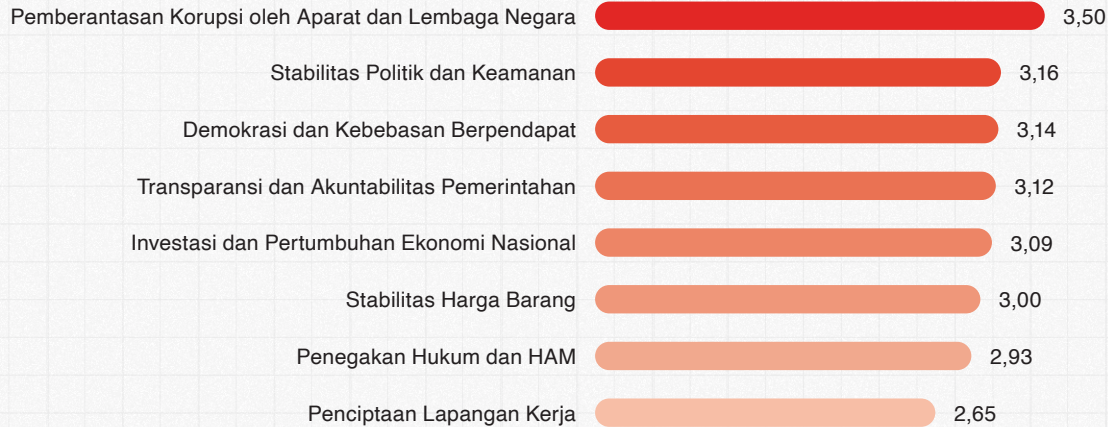
**4,01 – 5,00**  
**Kinerja Baik**



03

## Hasil Riset

## Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Berbagai Bidang



Pemberantasan korupsi oleh aparat dan lembaga negara mendapatkan penilaian skor kinerja sedang menuju baik (3,50). Skor tersebut sangat mungkin dipengaruhi persepsi masyarakat yang mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pemberantasan korupsi seperti keberhasilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

menyita uang sebesar Rp11 triliun dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng dan pengusutan dugaan korupsi kasus Chromebook yang melibatkan Nadiem Anwar Makarim (NAM), mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024.

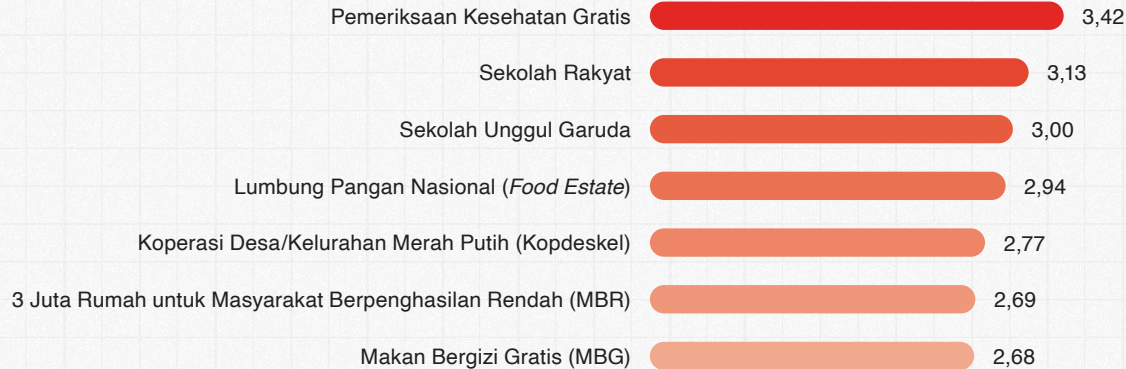
## Program Unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Skor sedang diperoleh dalam bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3,16), Demokrasi dan Kebebasan (3,14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3,12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3,09), dan Stabilitas Harga Barang (3,00). Skor sedang mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo mampu mencapai beberapa hal yang ditargetkan tetapi publik masih menunggu pemenuhan target yang lain.

Skor kinerja penegakan hukum dan HAM sebesar 2,93 menunjukkan masih ada harapan atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Apalagi, dalam berbagai kesempatan pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menegakkan hukum dan HAM melalui retorika dan penguatan institusi, dan respons cepat pada peristiwa-peristiwa besar seperti kematian pengemudi Gojek, Affan Kurniawan, terlindas mobil Rantis Brimob saat mengantar orderan di tengah demonstrasi yang berlangsung tanggal 29 Agustus 2025.

Penciptaan lapangan kerja mendapatkan skor penilaian 2,65. Ada beberapa faktor yang mungkin menghambat penciptaan lapangan kerja. Dari luar negeri, kinerja ekspor dan impor barang industri dipengaruhi oleh situasi internasional seperti tarif tinggi dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Perang Rusia-Ukraina, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah (di bawah 3,0%). Dari dalam negeri, muncul fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sentra industri. Dengan demikian, publik menunggu inovasi dan kebijakan nyata pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.

## Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Berbagai Bidang



Di antara berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, Pemeriksaan Kesehatan Gratis mendapatkan skor 3,42 atau sedang menuju baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa publik mengapresiasi program pengecekan kesehatan yang memang dibutuhkan masyarakat dan bisa menjadi dasar perbaikan data Kesehatan nasional. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi yang menjangkau

seluruh wilayah, termasuk daerah miskin dan terpencil.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda masing-masing mendapatkan skor 3,13 dan 3,00. Publik memberi apresiasi atas inisiatif pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, karena masih berada di tahap awal, publik menantikan langkah-langkah lanjutan untuk memperkokoh kelembagaan sekolah tersebut dan peningkatan kualitas insan pelaksanaannya.

## Program Unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) mendapatkan skor sedang yaitu 2,94. Skor ini bisa ditafsirkan bahwa publik memahami pentingnya Indonesia memiliki ketahanan pangan dan kelimpahan stok makanan. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi importir bagi beberapa produk pangan seperti jagung, daging, susu, dan kedelai. Apalagi lahan di wilayah penghasil utama padi seperti di Pulau Jawa banyak mengalami alih fungsi menjadi pembangunan perumahan dan perkantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pabrik. Dalam hal ini, publik masih menunggu hasil dari pelaksanaan lumbung pangan nasional tersebut. Sikap menunggu juga ditujukan pada pelaksanaan program lain seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang masing-masing mendapatkan skor 2,69,

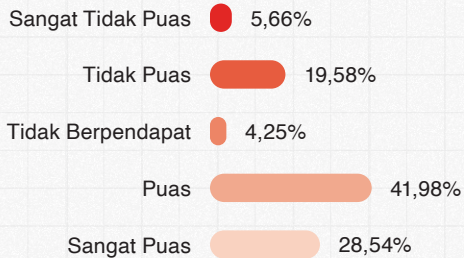
Program Makan Bergizi Gratis mendapatkan skor sedang sebanyak 2,68. Penilaian tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh masifnya pemberitaan keracunan makanan di beberapa sekolah, dan upaya membandingkan program MBG di

Indonesia dengan program makan bergizi di negara-negara maju. Perbandingan tersebut mendorong ekspektasi besar masyarakat terhadap hasil program MBG itu sendiri yang sebenarnya masih dalam tahap awal Pembangunan kelembagaan dan tata kelola. Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan program yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi makanan bagi anak Indonesia dan sangat membantu untuk keluarga miskin dan tidak mampu. Program tersebut juga bisa ditemukan di negara-negara maju seperti Jepang dan Perancis. Bahkan saat muncul pandemi Covid-19, pemerintah Perancis tidak menghentikan program tersebut, karena bisa menyebabkan hilangnya generasi akibat konsumsi gizi yang buruk. Dalam kasus di Indonesia, yang perlu diperlakukan adalah perbaikan tata kelola seperti melibatkan peran aktif sekolah dalam mempersiapkan makanan dan kontribusi masyarakat untuk mengurangi beban berat anggaran yang harus ditanggung oleh APBN.

## Pertanyaan Isu-Isu Mutakhir

### DPR RI

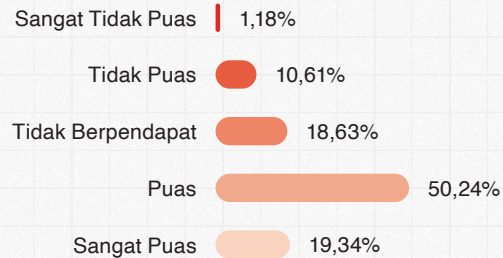
Tingkat kepuasan terhadap kebijakan partai politik yang menonaktifkan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif dan aspiratif terhadap kebutuhan rakyat.



Sebanyak 70.52% narasumber menyatakan puas dengan tindakan partai politik yang menonaktifkan anggotanya yang dianggap tidak sensitif dan aspiratif terhadap kebutuhan rakyat dan sebanyak 25.24% masih merasa tidak puas, dan sisanya menyatakan tidak berpendapat.

### Reshuffle Kabinet

Tingkat kepuasan terkait Presiden Prabowo Subianto mengganti beberapa anggota kabinet di bulan September 2025.



Sebanyak 69.58% narasumber menyatakan kepuasan terhadap Tindakan Presiden Prabowo mengganti para Menteri yang dianggap kurang bekerja dengan baik, sedangkan 11.79% masih menyatakan ketidakpuasannya, dan sisanya menyatakan tidak berpendapat.

# Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

## 10 Peringkat Teratas Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

3,35 poin

**Kemdikdasmen**  
Abdul Mu'ti

#1



3,32 poin

**Kemlu**  
Sugiono

#2



3,26 poin

**Kemenag**  
Nasaruddin  
Umar

#3



3,22 poin

**Kemrdikti**  
Saintek  
Brian Yuliarto

#4



3,21 poin

**Kementan**  
Amran  
Sulaiman

#5



3,15 poin

**Kemenkeu**  
Purbaya Yudhi  
Sadewa

#6



3,14 poin

**Kemendagri**  
Tito Karnavian

#7



3,13 poin

**Kemenhan**  
Sjafrie  
Sjamsuddin

#8



3,12 poin

**Kemenhut**  
Raja Julri Antoni

#9



3,09 poin

**BKPM**  
Rosan  
Roeslani

#10



## 10 Peringkat Teratas Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), disusul Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

## Skor Penilaian Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

| No | Kementerian   | Skor |
|----|---|------|
| 1  | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah                                 | 3,35 |
| 2  | Kementerian Luar Negeri   | 3,32 |
| 3  | Kementerian Agama   | 3,26 |
| 4  | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi                       | 3,22 |
| 5  | Kementerian Pertanian   | 3,21 |
| 6  | Kementerian Keuangan  | 3,15 |
| 7  | Kementerian Dalam Negeri  | 3,14 |
| 8  | Kementerian Pertahanan  | 3,13 |
| 9  | Kementerian Kehutanan   | 3,12 |
| 10 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/<br>Badan Koordinasi Penanaman Modal | 3,09 |

| No | Kementerian  | Skor |
|----|--|------|
| 11 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan    | 3,08 |
| 12 | Kementerian Perdagangan  | 3,08 |
| 13 | Kementerian Kesehatan  | 3,07 |
| 14 | Kementerian Sekretarian Negara                                       | 3,07 |
| 15 | Kementerian Pekerjaan Umum   | 3,03 |
| 16 | Kementerian Perindustrian  | 3,03 |
| 17 | Kementerian Pemuda dan Olaharga Koperasi                             | 3,03 |
| 18 | Kementerian Perhubungan  | 3,02 |
| 19 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah | 3,02 |

## Skor Penilaian Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

| No | Kementerian   | Skor |
|----|---|------|
| 20 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2,98 |
| 21 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan                             | 2,98 |
| 22 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | 2,98 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat            | 2,98 |
| 24 | Kementerian Sosial  | 2,98 |
| 25 | Kementerian Ketenagakerjaan                                       | 2,98 |
| 26 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       | 2,98 |
| 27 | Kementerian Komunikasi dan Digital                                | 2,98 |

| No | Kementerian   | Skor |
|----|---|------|
| 28 | Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan  | 2,97 |
| 29 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  | 2,96 |
| 30 | Kementerian Kebudayaan  | 2,94 |
| 31 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan   | 2,93 |
| 32 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional                               | 2,92 |
| 33 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2,92 |
| 34 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup                                      | 2,92 |

## Skor Penilaian Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

| No | Kementerian  | Skor |
|----|--|------|
| 35 | Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah   | 2,91 |
| 36 | Kementerian Pariwisata   | 2,91 |
| 37 | Kementerian Kelautan dan Perikanan   | 2,90 |
| 38 | Kementerian Koperasi   | 2,90 |
| 39 | Kementerian Ekonomi Kreatif/<br>Badan Ekonomi Kreatif  | 2,88 |
| 40 | Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 2,87 |
| 41 | Kementerian Hukum  | 2,86 |
| 42 | Kementerian Transmigrasi   | 2,83 |

| No | Kementerian  | Skor |
|----|--|------|
| 43 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan | 2,81 |
| 44 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional                         | 2,81 |
| 45 | Kementerian Hak Asasi Manusia  | 2,79 |
| 46 | Kementerian Perumahan Dan Kawan Permukiman   | 2,77 |
| 47 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral   | 2,74 |

# Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Djamari Chaniago**

## **Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan**

### **Program**

1. Menjaga stabilitas keamanan dan politik.
2. Penguatan pertahanan nasional dan industri pertahanan.
3. Memperkuat keamanan maritim.
4. Stabilitas keamanan dan keteramtiban masyarakat dan& penegakan hukum.
5. Deteksi dini konflik sosial dan& radikalisme.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Djamari Chaniago**  
**Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,93 (sedang)

#### Faktor Positif

- Stabilitas politik makro masih terjaga;
- Memberi dukungan pada industri pertahanan.

#### Faktor Negatif

- Gagal mengantisipasi konflik sosial;
- Penegakan hukum masih lemah;
- Kepemimpinan tidak terlihat.

#### Isu Strategis

- Kerusuhan Agustus–September 2025;
- Pembungkaman aspirasi publik;
- Lemahnya deteksi dini konflik.

#### Rekomendasi

1. Tingkatkan sistem early warning deteksi dini terhadap konflik.
2. Perkuat komunikasi publik dan koordinasi lintas lembaga.
3. Jaga netralitas dan supremasi sipil.



**Yusril Ihza Mahendra**

## **Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan**

### **Program**

1. Efisiensi penggunaan anggaran tanpa *mark-up*.
2. Penggunaan perjalanan dinas secara selektif.
3. Pelaksanaan program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain.
5. Pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pejabat manajerial yang tidak produktif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Yusril Ihza Mahendra**  
**Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,81 (sedang)

#### Faktor Positif

- Respons Menteri aktif;
- Membuka inovasi atas sistem imigrasi digital.

#### Faktor Negatif

- Penegakan hukum lemah;
- Penegakan Hak Asasi Manusia mengalami stagnasi;
- Tata kelola anggaran tampak belum transparan.

#### Isu Strategis

- Kurang sinkronisasi;
- Belum ada program berdampak;
- Lemahnya akuntabilitas publik.

#### Rekomendasi

1. Perkuat koordinasi dan pengawasan lintas lembaga.
2. Percepat penyelesaian kasus HAM berat.
3. Publikasikan capaian dan inovasi agar transparan di mata publik.



**Airlangga Hartarto**

## **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

### **Program**

- 1.** Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2.** Meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- 3.** Swasembada pangan, energi, dan air.
- 4.** Penyederhanaan regulasi agar iklim usaha lebih kondusif.
- 5.** Mengurangi ketergantungan impor.
- 6.** Penekanan pada percepatan proyek infrastruktur dan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Airlangga Hartarto Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

##### Faktor Positif

- Inklusi keuangan meningkat;
- UMKM dan KUR berkembang;
- Kepemimpinan dinilai adaptif.

##### Faktor Negatif

- Deregulasi belum berjalan;
- Pengangguran masih tinggi.

##### Isu Strategis

- Inkonsistensi regulasi;
- Stagnasi investasi;
- Kebijakan populis.

##### Rekomendasi

1. Reformasi regulasi investasi dan tenaga kerja.
2. Fasilitasi penciptaan lapangan kerja.
3. Integrasi kebijakan fiskal dan industri untuk pertumbuhan inklusif.



### Pratikno

## Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

### Program

1. Renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggul.
2. Penanggulangan tuberkulosis atau TBC, termasuk pembangunan rumah sakit dan skrining kesehatan gratis masyarakat.
3. Digitalisasi Pendidikan.
4. Penurunan angka *stunting*.
5. Penanganan bencana di Indonesia.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Pratikno Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

3,08 (sedang)

##### Faktor Positif

- Respons cepat terhadap bencana;
- Digitalisasi pendidikan;
- Pemeriksaan kesehatan gratis.

##### Faktor Negatif

Penanganan *stunting* masih stagnan;  
Program pemeriksaan kesehatan belum menyentuh masyarakat adat.

##### Isu Strategis

- Kesenjangan wilayah;
- Partisipasi publik masih rendah;
- Komunikasi publik minim.

##### Rekomendasi

1. Perluas publikasi program dan capaian.
2. Gunakan pendekatan partisipatif dalam pembangunan manusia.
3. Perkuat sinergi lintas kementerian untuk menangani *stunting* dan pembangunan kebudayaan.



**Agus Harimurti Yudhoyono**

## **Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah**

### **Program**

- 1.** Pembangunan infrastruktur dalam bidang perairan dan bendungan.
- 2.** Pembangunan infrastruktur energi bersih.
- 3.** Pembangunan sistem konektivitas infrastruktur transportasi.
- 4.** Pembangunan infrastruktur kota layak huni dan Tangguh.
- 5.** Reformasi pembiayaan untuk infrastruktur berkelanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Agus Harimurti Yudhoyono Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

3,02 (sedang)

##### Faktor Positif

- Fokus energi bersih;
- Reformasi pembiayaan;
- Koordinasi lintas kementerian.

##### Faktor Negatif

Masih terjadi ketimpangan pembangunan antardaerah.

##### Isu Strategis

- Pemerataan infrastruktur;
- Pemanfaatan proyek lama secara baik.

##### Rekomendasi

1. Dorong percepatan pembangunan di luar Jawa & wilayah 3T.
2. Tingkatkan komunikasi publik.
3. Fokus pada hasil nyata & inovasi pembiayaan berkelanjutan.



Muhaimin Iskandar

## Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Program

1. Pengentasan kemiskinan.
2. Satu Data Kesejahteraan Sosial.
3. Penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan ekonomi pedesaan.
4. Suksesasi makan bergizi gratis.
5. Pemberdayaan warga transmigran.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Muhaimin Iskandar**  
**Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

#### Faktor Positif

- Adanya satu data kesejahteraan sosial;
- Penguatan UMKM dan koperasi;
- Pemberdayaan transmigrasi.

#### Faktor Negatif

- Masih terjadinya tumpang tindih kelembagaan;
- Lemahnya implementasi program.

#### Isu Strategis

- Akurasi data;
- Koordinasi lintas kementerian;
- Peran partisipatif masyarakat.

#### Rekomendasi

1. Reformasi koordinasi lintas lembaga agar tidak tumpang tindih.
2. Dorong keterlibatan komunitas lokal dan UMKM dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Fokus pada data berbasis bukti dan pengentasan kemiskinan.



**Zulkifli Hasan**

## **Kementerian Koordinator Bidang Pangan**

### **Program**

- 1.** Swasembada pangan, energi, dan air.
- 2.** Ketersediaan pupuk.
- 3.** Jaminan keberlangsungan lingkungan.
- 4.** Ketersediaan pestisida.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Zulkifli Hasan**  
**Kementerian Koordinator**  
**Bidang Pangan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

#### Faktor Positif

- Swasembada beras;
- Adanya Inpres 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan;
- Energi, dan Air Nasional;
- Perbaikan distribusi pupuk.

#### Faktor Negatif

- Masih terjadinya ketergantungan impor;
- Tumpang tindih kelembagaan;
- Kurangnya terobosan.

#### Isu Strategis

- Ketahanan pangan berbasis petani kecil;
- Ekologi pangan berkelanjutan;
- Regulasi pascapanen.

#### Rekomendasi

1. Menegaskan Kembali peran koordinatif Kemenko Pangan.
2. Integrasikan kebijakan pangan–energi–air.
3. Kurangi tumpang tindih dengan Kemenko lain.
4. Dorong program inovasi pascapanen dan perlanjar distribusi produksi lokal.

Prasetyo Hadi

## Kementerian Sekretariat Negara



### Program

1. Penyelesaian Perpres terkait pemisahan/ penggabungan kKementerian/ILembaga.
2. Integrasi Sekretariat Kabinet ke dalam Kemensetneg
3. Fasilitasi hak keuangan dan fasilitas lain bagi lembaga yang sekretariatnya berada di bawah koordinasi Kemensetneg.
4. Orkestrasi publikasi, komunikasi, dan dokumentasi kegiatan Presiden.
5. Peningkatan pengelolaan istana-istana kKepresidenan.
6. Penataan organisasi dan peta jabatan Kemensetneg.
7. Pemantauan dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pPemerintah
8. Penyelenggaraan sSidang kKabinet
9. Program dukungan manajemen dan& layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Prasetyo Hadi**  
**Kementerian Sekretariat Negara**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,07 (sedang)

#### Faktor Positif

- Cepat dalam penyelesaian regulasi;
- Koordinasi antarlembaga membaik;
- Reformasi birokrasi mulai terlihat.

#### Faktor Negatif

- Komunikasi publik perlu ditingkatkan;
- Transparansi perlu ditingkatkan.

#### Isu Strategis

- Efisiensi anggaran;
- Digitalisasi birokrasi;
- Peran strategis dalam kebijakan lintas kementerian.

#### Rekomendasi

1. Modernisasi sistem melalui digitalisasi.
2. Transparansi publikasi kebijakan.
3. Optimalkan peran Setneg dalam sinkronisasi kebijakan lintas sektor.



**Tito Karnavian**

## **Kementerian Dalam Negeri**

### **Program**

- 1.** Pengelolaan otonomi daerah.
- 2.** Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3.** Pemerintahan berbasis digital.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Tito Karnavian**  
**Kementerian Dalam Negeri**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,14 (sedang)

#### Faktor Positif

- Koordinasi pusat-daerah membaik;
- Reformasi birokrasi telah berjalan;
- Digitalisasi mulai dirintis.

#### Faktor Negatif

- Cenderung sentralistik;
- Belum efektif meningkatkan kapasitas daerah;
- Lemahnya pengawasan otonomi.

### Isu Strategis

- Desentralisasi;
- Digitalisasi pemerintahan;
- Penguatan kapasitas daerah.

### Rekomendasi

1. Perkuat digitalisasi pemerintahan daerah.
2. Reformasi otonomi berbasis kinerja.
3. Tingkatkan koordinasi keamanan dan politik lokal.
4. Hindari sentralisasi berlebihan.
5. Dorong inovasi dan kepemimpinan baru yang lebih adaptif.



**Sugiono**

## **Kementerian Luar Negeri**

### **Program**

- 1.** Diplomasi Ketahanan Nasional.
- 2.** Diplomasi Ekonomi Berbasis Nilai Pancasila.
- 3.** Penguatan Institusi dan Organisasi Kementerian Luar Negeri.
- 4.** Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Diaspora.
- 5.** Meningkatkan Pengaruh dan Peran Indonesia di tingkat Global dan Multilateral.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Sugiono**  
**Kementerian Luar Negeri**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,32 (sedang)

#### Faktor Positif

- Keanggotaan BRICS;
- Stabilitas diplomasi;
- Perlindungan WNI melalui sarana digital.

#### Faktor Negatif

- Kepemimpinan kurang menonjol;
- Kurang inisiatif mandiri.

### Isu Strategis

- Diplomasi ekonomi;
- Politik bebas aktif;
- Perlindungan diaspora.

### Rekomendasi

1. Tegaskan arah diplomasi bebas aktif berbasis HAM.
2. Perkuat diplomasi ekonomi dan publik.
3. Tingkatkan perlindungan WNI di luar negeri.
4. Reposisi peran Kementerian Luar Negeri agar tidak sekadar mengikuti Presiden.
5. Rebranding citra diplomasi Indonesia di Global South agar bisa lebih adaptif dengan situasi kontemporer.



**Sjafrie Sjamsoeddin**

## **Kementerian Pertahanan**

### **Program**

- 1.** Modernisasi Alutsista, Nonalutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan.
- 2.** Pembinaan Sumber Daya Manusia Pertahanan.
- 3.** Pembangunan Industri Pertahanan Dalam Negeri dan& Teknologi Prioritas.
- 4.** Perbaikan Postur Pertahanan dan& *Quick Wins*.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Sjafrie Sjamsoeddin**  
**Kementerian Pertahanan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,13 (sedang)

#### Faktor Positif

- Modernisasi alutsista;
- Kemitraan industri pertahanan.

#### Faktor Negatif

- Transparansi rendah;
- Militerisasi sipil.

#### Isu Strategis

- Efektivitas anggaran;
- Peran industri nasional.

#### Rekomendasi

1. Transparansi dan audit pengadaan alutsista.
2. Fokus pada industri dalam negeri.
3. Batasi peran militer di ranah sipil.
4. Penguatan SDM dan riset pertahanan,
5. Adaptasi kebijakan terhadap kondisi geografis Indonesia.



**Nasaruddin Umar**

## **Kementerian Agama**

### **Program**

1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
2. Tata kelola dan Pelaksanaan Ibadah haji dan umrah
3. Pemberdayaan pesantren
4. Penguatan Ekoteologi
5. Layanan Keagamaan Berdampak
6. Pemberdayaan Ekonomi umat
7. Digitalisasi Tata Kelola

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Nasaruddin Umar**  
**Kementerian Agama**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,26 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program pesantren dan ekonomi umat;
- Konsep ekoteologi;
- Kurikulum Cinta.

#### Faktor Negatif

- Penyelenggaraan haji buruk;
- Korupsi;
- Masih terjadi intoleransi agama;
- Lemahnya kepemimpinan.

### Isu Strategis

- Reformasi birokrasi
- Transparansi haji;
- Perlindungan hak minoritas.

### Rekomendasi

1. Reformasi total tata kelola haji.
2. Transparansi pengangkatan pejabat.
3. Implementasi nyata moderasi beragama.
4. Penguatan pesantren dan ekonomi umat.
5. Penegakan toleransi dan perlindungan rumah ibadah minoritas.



**Supratman Andi Agtas**

## **Kementerian Hukum**

### **Program**

1. Layanan Hukum
2. Pembuatan Undang-Undang
3. Restrukturisasi Birokrasi
4. Digitalisasi pelayanan

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Supratman Andi Agtas**  
**Kementerian Hukum**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,86 (sedang)

#### Faktor Positif

- Layanan digital di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dinilai efektif, cepat, dan efisien;
- Beberapa inisiatif penyusunan regulasi sudah disiapkan dan disampaikan ke DPR;
- Kementerian cukup cepat dalam merespons layanan kasus hukum tertentu.

#### Faktor Negatif

- Reformasi hukum substantif, bukan sekadar administratif;
- Integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;
- Partisipasi publik dan transparansi legislasi;
- Sinkronisasi regulasi lintas sektor agar tidak tumpang tindih;
- Digitalisasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Supratman Andi Agtas**  
**Kementerian Hukum**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Reformasi hukum substantif, bukan sekadar administratif;
- Integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;
- Partisipasi publik dan transparansi legislasi;
- Sinkronisasi regulasi lintas sektor agar tidak tumpang tindih;
- Digitalisasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

#### Rekomendasi

1. Lakukan reformasi substansial sistem hukum yang menembus akar persoalan demi penegakan keadilan.
2. Perkuat integritas aparat hukum dan bersihkan praktik makelar kasus.
3. Dorong partisipasi publik dalam proses legislasi untuk menghindari kebijakan yang mencederai logika dan rasa keadilan masyarakat.
4. Tingkatkan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang.
5. Pertahankan dan perluas transformasi digital layanan hukum yang telah berjalan baik.



**Natalius Pigi**

## **Kementerian Hak Asasi Manusia**

### **Program**

- 1.** Prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender.
- 2.** Penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil.
- 3.** Kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- 4.** Perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Natalius Pigai**  
**Kementerian Hak Asasi Manusia**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,79 (sedang)

#### Faktor Positif

- Menteri dinilai cukup aktif menanggapi kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi;
- Ada indikasi penguatan demokrasi dan kebebasan sipil dalam periode awal pemerintahan Prabowo–Gibran melalui beberapa program;
- Program afirmatif bagi kelompok rentan mulai dijalankan;
- Ada janji janji penyelesaian kasus HAM di daerah.

#### Faktor Negatif

- Kasus pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas (impunitas masih tinggi);
- Kebebasan berekspresi dan beragama masih sering dibatasi, sementara kriminalisasi aktivis dan intoleransi tetap terjadi;
- Tidak ada terobosan besar, bahkan dianggap “business as usual;”
- Kelembagaan tumpang tindih dengan Komnas HAM; peran kementerian dianggap lemah dibanding lembaga lain;
- Kurang sosialisasi kebijakan dan komunikasi publik yang jelas;
- Persepsi publik terhadap integritas dan kompetensi Menteri cenderung negatif;
- Belum ada langkah konkret menyelesaikan pelanggaran HAM struktural dan sistemik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Natalius Pigai**  
**Kementerian Hak Asasi Manusia**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan pencegahan pelanggaran baru;
- Kebebasan sipil dan ruang demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi dan beragama;
- Perlindungan kelompok rentan (minoritas, perempuan, disabilitas, anak, dan adat);
- Penguatan kelembagaan HAM agar setara dengan kementerian/lembaga lain;
- Sinergi Kemenham–Komnas HAM–Kemenko Polhukam dalam perlindungan hak warga negara.

#### Rekomendasi

1. Lakukan reformasi kelembagaan HAM nasional agar tidak tumpang tindih dengan Komnas HAM dan memiliki kewenangan kuat.
2. Tuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mekanisme keadilan yang transparan.
3. Perluas perlindungan bagi kelompok rentan dan minoritas agama serta etnis.
4. Hentikan kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan sipil.
5. Tingkatkan edukasi dan sosialisasi HAM ke seluruh lembaga negara dan masyarakat.
6. Dorong kepemimpinan yang empatik dan berintegritas tinggi dalam menangani isu-isu kemanusiaan.



**Agus Andrianto**

## **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

### **Program**

- 1.** Pemberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan.
- 2.** Pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembinaan UMKM.
- 3.** Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasarakatan.
- 4.** Mengatasi permasalahan kapasitas dan kepadatan di rumah tahan (rutan) maupun lapas (lembaga pemasarakatan) dengan solusi yang komprehensif.
- 5.** Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Agus Andrianto Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,97 (sedang)

#### Faktor Positif

- Digitalisasi layanan imigrasi dinilai efisien, cepat, dan menekan praktik percaloan;
- Fasilitas LP/Lapas mulai ditingkatkan, termasuk pembangunan dan renovasi beberapa lembaga pemsarakatan;
- Program pemberdayaan warga binaan berjalan di beberapa daerah dan diapresiasi karena memberi bekal keterampilan pascabebas;
- Layanan imigrasi di beberapa daerah dan bandara internasional dinilai meningkat dalam hal kecepatan dan sistem data digital.

#### Faktor Negatif

- Masalah narkoba dan peredaran ponsel di Lapas tetap tinggi, menandakan lemahnya pengawasan dan integritas petugas;
- Over kapasitas rutan dan lapas kronis, belum ada solusi strategis yang efektif;
- Program pemberdayaan warga binaan belum masif, hanya terlihat di beberapa lokasi;
- Koordinasi kelembagaan tumpang tindih, terutama dalam manajemen imigrasi dan pemsarakatan;
- Reformasi struktural dan kultural belum menyentuh akar masalah.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Agus Andrianto Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan kebutuhan reformasi sistem penahanan;
- Peredaran narkoba dan korupsi di lapas;
- Penguatan digitalisasi layanan keimigrasian nasional;
- Pemberdayaan dan reintegrasi sosial warga binaan;
- Transparansi dan pengawasan petugas pemasyarakatan.

##### Rekomendasi

1. Lakukan reformasi menyeluruh sistem pemasyarakatan, termasuk redistribusi narapidana, program rehabilitasi, dan alternatif hukuman bagi pelanggaran ringan.
2. Perkuat integritas dan pengawasan internal petugas lapas, termasuk hukuman berat bagi oknum yang terlibat narkoba.
3. Perluas digitalisasi imigrasi dengan menekankan keandalan data, perlindungan privasi, dan pemerataan akses di daerah.
4. Intensifkan program pemberdayaan warga binaan agar produktif dan siap kembali ke masyarakat.
5. Tingkatkan komunikasi publik dan sosialisasi program kerja agar kinerja kementerian lebih transparan dan dikenal masyarakat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Purbaya Yudhi Sadewa**

# Kementerian Keuangan

## Program

1. Menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian nasional saat ini.
2. Mengendalikan utang negara.
3. Meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak dan nonpajak.
4. Mendorong investasi dan pertumbuhan usaha.
5. Pengelolaan Anggaran negara (APBN) dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Purbaya Yudhi Sadewa** **Kementerian Keuangan**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

#### **Kategori Penilaian**

3,15 (sedang)

#### **Faktor Positif**

- Manajemen fiskal stabil dan kredibel, defisit terkendali dan pengelolaan APBN relatif transparan;
- Stabilitas harga pangan relatif terjaga meskipun tekanan inflasi global tinggi;
- Sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi program dinilai paling rapi dibanding kementerian lain;

- Digitalisasi anggaran dan laporan fiskal memperkuat akuntabilitas publik;
- Transparansi investasi dan pendapatan negara meningkat pada beberapa sektor.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Purbaya Yudhi Sadewa** **Kementerian Keuangan**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Faktor Negatif**

- Utang negara terus meningkat, sementara produktivitas belanja publik belum optimal;
- Rasio pajak terhadap PDB stagnan, terutama dari individu dan korporasi besar;
- Kebijakan fiskal masih konservatif, kurang berani dalam inovasi pendapatan nonpajak dan reformasi pajak progresif;
- Koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dalam kebijakan investasi dan distribusi dana daerah;
- Ketergantungan pada program presiden (MBG, subsidi, dll.) membuat alokasi fiskal kurang tepat sasaran;
- Kebijakan transfer ke daerah yang menurun mendorong daerah menaikkan pajak secara berlebihan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Purbaya Yudhi Sadewa Kementerian Keuangan**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Isu Strategis**

- Keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi;
- Reformasi pajak progresif dan perluasan basis pajak;
- Penurunan ketergantungan pada utang;
- Efektivitas belanja negara dalam mendukung program prioritas;
- Peningkatan penerimaan nonpajak (PNBP) melalui sektor SDA dan ekonomi digital.

#### **Rekomendasi**

1. Tingkatkan rasio pajak terhadap PDB melalui reformasi pajak progresif, terutama bagi korporasi besar dan individu sangat kaya.
2. Diversifikasi pendapatan negara melalui penguatan sektor nonpajak, ekonomi digital, dan sumber daya alam berkelanjutan.
3. Kurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dengan memperbaiki produktivitas belanja publik.
4. Dorong inovasi fiskal daerah, agar transfer ke daerah lebih efisien dan adil.
5. Perkuat tata kelola dan akuntabilitas agar APBN tidak terserap untuk proyek populis yang rendah dampak.
6. Lanjutkan reformasi struktural yang dirintis Sri Mulyani, dengan terobosan baru yang adaptif dan berani.



**Abdul Mu'ti**

## **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

### **Program**

- 1.** Redistribusi guru ASN.
- 2.** Pembaharuan manajemen sistem kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- 3.** Program transformasi ke sistem penerimaan murid baru.
- 4.** Program pendekatan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*).
- 5.** Pembelajaran koding dan kecerdasan buatan.
- 6.** Program penerapan sistem evaluasi baru melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Abdul Mu'ti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,35 (sedang)

#### Faktor Positif

- Inovasi pembelajaran deep learning dan koding diapresiasi sebagai langkah adaptif terhadap era digital;
- Program redistribusi guru ASN mulai memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah;

- Sistem PPDB/SPMB baru dinilai lebih tertib dan minim gejolak dibanding tahun-tahun sebelumnya;
- Pengawasan dan evaluasi mutu pendidikan berjalan lebih objektif dan berbasis data;
- Beban administratif guru berkurang, memungkinkan mereka lebih fokus pada pembelajaran;
- Kepemimpinan menteri dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Abdul Mu'ti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Kebijakan sering berubah (misalnya dalam PPDB, TKA, evaluasi guru), menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan sistem;
- Program TKA dianggap langkah mundur, karena berorientasi pada tes, bukan kompetensi menyeluruh;
- Implementasi program AI dan koding belum merata, khususnya di luar Jawa;
- Kesejahteraan guru masih rendah; redistribusi guru ASN menimbulkan efek domino bagi guru honorer;
- Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan masih besar antarwilayah;
- Anggaran pendidikan menurun akibat program prioritas lain (seperti MBG) sehingga program inovatif sulit berkelanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Abdul Mu'ti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Pemerataan mutu dan fasilitas pendidikan antarwilayah;
- Konsistensi kebijakan kurikulum dan evaluasi nasional;
- Penguatan kapasitas dan kesejahteraan guru;
- Integrasi teknologi pendidikan (AI, koding, pembelajaran digital);
- Pendidikan karakter, etika, dan gotong royong sebagai inti pendidikan dasar.

#### Rekomendasi

1. Perkuat pemerataan akses pendidikan digital di seluruh daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pelatihan guru.
2. Harmonisasi kebijakan evaluasi pendidikan agar stabil dan tidak berubah setiap periode.
3. Fokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk guru honorer.
4. Kembangkan kurikulum adaptif berbasis karakter dan teknologi yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan etika sosial.
5. Pastikan kesinambungan anggaran pendidikan agar inovasi tidak berhenti di tengah jalan.
6. Dorong pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pendidikan vokasional dan koding.



**Brian Yulianto**

## **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

### **Program**

- 1.** Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan dan Berdampak.
- 2.** Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Ekonomi Nasional.
- 3.** Pengembangan Talenta Sains dan Teknologi.
- 4.** Penumbuhan dan Penguatan Budaya Ilmiah (*Scientific Culture*) Penelitian dan Pengembangan.
- 5.** Program berjalan dengan sangat baik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Brian Yulianto** **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

#### **Kategori Penilaian**

3,22 (sedang)

#### **Faktor Positif**

- Budaya riset dan publikasi ilmiah mulai menguat, dengan dukungan beasiswa, hibah riset, dan standar mutu akademik yang meningkat;
- Program kolaborasi riset dengan industri dan lembaga internasional mulai terlihat, meskipun masih terbatas;
- Sistem manajemen dan pedoman penelitian di perguruan tinggi dinilai semakin jelas dan terstandar;
- Fokus pada pemberdayaan dosen dan tenaga akademik melalui pelatihan, pengakuan akademik, dan dukungan beasiswa;
- Upaya membangun budaya ilmiah dan inovasi dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun SDM unggul.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Brian Yulianto**  
**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Masalah kesejahteraan dosen dan peneliti belum terselesaikan, terutama bagi dosen non-PNS dan di perguruan tinggi swasta;
- Sistem pengangkatan guru besar dianggap tidak transparan dan berbelit, sering dipengaruhi politik kampus dan administrasi berlebihan;
- Ketimpangan antara PTN dan PTS menimbulkan rasa ketidakadilan, baik dalam akses dana, penelitian, maupun rekrutmen mahasiswa;
- Fokus riset masih dangkal, terlalu diarahkan pada publikasi Scopus tanpa dampak nyata pada kebijakan publik dan inovasi industri;
- Hilirisasi riset dan kerja sama industri–kampus masih lemah; banyak hasil riset belum diterapkan secara ekonomi;
- Kebebasan akademik terbatas, kampus belum sepenuhnya merdeka dari intervensi politik atau birokrasi;
- Dana riset terbatas dan cenderung menurun, terutama bagi peneliti independen dan dosen muda.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Brian Yulianto** **Kementerian Pendidikan** **Tinggi, Sains, dan Teknologi**

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Reformasi sistem pengangkatan jabatan akademik (guru besar, lektor kepala, dsb.);
- Kesejahteraan dan perlindungan profesi dosen serta peneliti;
- Keadilan antara perguruan tinggi negeri dan swasta;
- Reorientasi riset: dari publikasi ke hilirisasi dan inovasi industri;
- Kebebasan akademik dan otonomi kampus;
- Pendanaan riset berkelanjutan dan berbasis dampak.

#### Rekomendasi

1. Reformasi sistem karier akademik agar lebih transparan, objektif, dan berbasis merit.
2. Naikkan kesejahteraan dosen dan peneliti, terutama di PTS dan lembaga nonnegara.
3. Dorong kolaborasi riset industri–kampus dengan insentif fiskal dan program triple helix (pemerintah–universitas–industri).
4. Reorientasi riset nasional dari sekadar publikasi Scopus menjadi riset aplikatif dan berbasis solusi untuk pembangunan nasional.
5. Berikan afirmasi pendanaan riset untuk PTS agar kesenjangan akademik bisa dipersempit.
6. Perkuat kebebasan akademik dan otonomi kampus dengan regulasi yang menjamin ruang berpikir kritis.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Fadli Zon**

# Kementerian Kebudayaan

## Program

1. Penghitungan Total Kekayaan Warisan Budaya Indonesia
2. Penggerakan pelaku kebudayaan di setiap daerah
3. Pemulangan benda budaya Indonesia dari luar negeri
4. Penulisan ulang sejarah Indonesia

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Fadli Zon**  
**Kementerian Kebudayaan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,94 (sedang)

#### Faktor Positif

- Upaya pemulangan artefak budaya dari Belanda diapresiasi sebagai langkah diplomatik dan kultural yang penting;
- Kegiatan kebudayaan daring dan luring di berbagai daerah cukup banyak, memberi ruang bagi pelaku seni dan masyarakat adat untuk tampil;

- Kementerian aktif mengangkat khasanah budaya lokal dan tradisi Nusantara melalui festival dan kegiatan kolaboratif;
- Adanya semangat untuk merevitalisasi kesadaran sejarah nasional dan mengaitkannya dengan identitas bangsa.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Fadli Zon**  
**Kementerian Kebudayaan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Program penulisan ulang sejarah telah menimbulkan polemik, berpotensi memanipulasi narasi sejarah dan mengganggu kohesi sosial;
  - Kurangnya transparansi dan partisipasi akademik dalam penyusunan sejarah nasional;
  - Digitalisasi warisan budaya berjalan lambat, belum menjadi gerakan nasional;
  - Program cenderung seremonial dan politis, belum menghasilkan dampak nyata terhadap pelestarian budaya;
- Kinerja menteri dan wakil menteri dinilai lemah dan lebih sibuk merespons kontroversi publik daripada membangun kebijakan substantif;
  - Minimnya perhatian terhadap masyarakat adat dan pengakuan atas aset budaya mereka;
  - Belum ada strategi integratif untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan ekonomi kreatif nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Fadli Zon**  
**Kementerian Kebudayaan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Kontroversi penulisan ulang sejarah nasional dan dampaknya terhadap identitas kolektif bangsa;
- Pelestarian dan pengakuan hak budaya masyarakat adat;
- Digitalisasi warisan budaya dan transformasi museum;
- Integrasi kebudayaan dengan ekonomi kreatif dan pariwisata;
- Pendidikan sejarah dan budaya yang objektif, inklusif, dan berbasis bukti.

#### Rekomendasi

1. Hentikan pendekatan politis dalam penulisan sejarah nasional, dan bentuk komisi independen sejarah yang melibatkan sejarawan lintas perspektif.
2. Percepat digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya agar bisa diakses publik dan menjadi aset ekonomi kreatif.
3. Berikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi masyarakat adat, termasuk pengakuan atas tanah dan karya budaya mereka.
4. Kembangkan strategi kebudayaan partisipatif dengan melibatkan akademisi, komunitas seni, dan masyarakat sipil.
5. Perkuat diplomasi budaya internasional dan sinergikan kebijakan dengan sektor pariwisata dan pendidikan.
6. Bangun narasi sejarah yang kritis dan inklusif, bukan sebagai alat legitimasi politik, melainkan untuk memperkuat persatuan nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Budi Gunadi Sadikin**

## **Kementerian Kesehatan**

### **Program**

- 1.** Penguatan rumah sakit rujukan vertikal dan jejaring rujukan di daerah sulit diakses.
- 2.** Konsolidasi pembiayaan, penguatan sistem asuransi/JKN.
- 3.** Peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan.
- 4.** Penguatan regulasi dan reformasi birokrasi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Budi Gunadi Sadikin** **Kementerian Kesehatan**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

#### **Kategori Penilaian**

3,07 (sedang)

#### **Faktor Positif**

- Akses layanan BPJS meningkat, banyak masyarakat menilai pelayanan rumah sakit semakin terbuka bagi peserta JKN;
- Program digitalisasi JKN dan pelayanan berbasis data kesehatan nasional mulai berjalan;
- Program pemerataan tenaga kesehatan dan dokter spesialis mulai dilaksanakan melalui redistribusi dan pendidikan berjenjang;
- Inovasi proaktif Menteri BGS (Budi Gunadi Sadikin) seperti reformasi sistem rumah sakit, penguatan pencegahan penyakit, serta penanganan perundangan PPDS diapresiasi;
- Program CKG (Cegah Kanker Gratis) dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin menunjukkan capaian positif dan dirasakan publik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Budi Gunadi Sadikin**  
**Kementerian Kesehatan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Pembiayaan BPJS Kesehatan (JKN) masih menjadi masalah besar: defisit, pembayaran lambat, dan koordinasi klaim yang rumit;
- Kualitas layanan belum merata, terutama di luar Jawa dan kawasan timur;
- Kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan primer (dokter, bidan, apoteker) masih tinggi di tingkat desa dan kecamatan;
- Kurangnya sosialisasi dan komunikasi publik membuat sebagian kebijakan dianggap tidak jelas atau kontroversial;
- Kementerian kurang sinergi dengan asosiasi profesi kesehatan, sehingga kerap menimbulkan resistensi atau konflik kebijakan;
- Dana BLU rumah sakit yang disetor ke pusat dinilai menghambat otonomi pengelolaan layanan publik di daerah.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Budi Gunadi Sadikin Kementerian Kesehatan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Krisis pembiayaan BPJS dan reformasi sistem JKN;
- Pemerataan fasilitas dan tenaga medis di daerah;
- Digitalisasi sistem kesehatan nasional dan big data kesehatan;
- Sinergi lintas lembaga dan profesi kesehatan;
- Keseimbangan antara kuratif (pengobatan) dan preventif (pencegahan).

#### Rekomendasi

1. Lakukan reformasi struktural pada sistem BPJS Kesehatan, termasuk mekanisme klaim, audit, dan distribusi dana ke fasilitas layanan.
2. Percepat pemerataan tenaga medis melalui insentif wilayah 3T dan program dokter-desa berbasis kontrak nasional.
3. Kembangkan sistem data kesehatan terintegrasi nasional (One Health Data) untuk efisiensi dan transparansi.
4. Tingkatkan kolaborasi dengan tenaga medis, organisasi profesi, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.
5. Dorong paradigma pencegahan penyakit, dengan memperkuat edukasi publik, gizi, dan kesehatan lingkungan.
6. Berikan otonomi finansial lebih besar kepada rumah sakit BLU untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi daerah.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



Saifullah Yusuf

# Kementerian Sosial

## Program

1. Integrasi menuju data tunggal terpadu sosial ekonomi.
2. Pembangunan kampung nelayan sejahtera.
3. Penataan regulasi kesejahteraan sosial.
4. Konsolidasi nasional pilar-pilar sosial dan Pemerintah Daerah.
5. Sekolah rakyat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Saifullah Yusuf**  
**Kementerian Sosial**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program Sekolah Rakyat (SR) dinilai sebagai terobosan baik untuk akses pendidikan masyarakat kelas bawah, terutama di daerah pesisir dan miskin kota;
- Program Kampung Nelayan Sejahtera memperlihatkan arah pemberdayaan berbasis komunitas, meskipun masih terbatas skalanya;

- Upaya konsolidasi data sosial ekonomi (Satu Data Kesejahteraan Sosial) menunjukkan niat memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih akurat;
- Respons cepat terhadap bencana sosial dan penyaluran bantuan darurat masih menjadi salah satu kekuatan Kementerian Sosial.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Saifullah Yusuf Kementerian Sosial

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Kurangnya sosialisasi dan transparansi terhadap program kerja menyebabkan masyarakat tidak mengetahui arah dan capaian kementerian;
- Data penerima bansos belum akurat: masih ditemukan warga miskin tidak terdata dan penerima bantuan ganda;
- Belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan;
- Fokus program terlalu banyak seremonial dan politis, bukan berbasis dampak sosial ekonomi nyata;
- Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan dinilai belum matang dalam perencanaan dan sinergi antarlembaga;
- Koordinasi lemah dengan lembaga data nasional seperti BPS dan BKKBN, sehingga basis data kemiskinan belum sepenuhnya terintegrasi;
- Program bantuan sosial masih bersifat karitatif, belum berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Saifullah Yusuf**  
**Kementerian Sosial**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Validitas dan integrasi Satu Data Kesejahteraan Sosial;
- Transisi dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan produktif;
- Konsolidasi kebijakan sosial lintas lembaga (BPS, BKKBN, Kementerian Desa);
- Reformasi program Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan agar berkelanjutan;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi bansos.

#### Rekomendasi

1. Perkuat integrasi data sosial nasional bersama BPS dan BKKBN agar *targeting* bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial.
2. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.
3. Kaji ulang desain Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan agar memiliki indikator kinerja, *roadmap*, dan sistem monitoring yang jelas.
4. Perkuat koordinasi lintas lembaga dan daerah untuk mempercepat penyatuan data dan pengawasan program.
5. Bangun komunikasi publik yang transparan dan partisipatif agar masyarakat memahami manfaat dan arah program sosial.
6. Reorientasikan Kemensos sebagai katalis inklusi sosial, bukan sekadar penyalur bantuan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



Yassierli

# Kementerian Ketenagakerjaan

## Program

1. Transformasi digital sektor ketenagakerjaan.
2. Peningkatan produktivitas dan pelatihan keterampilan (*Up-skilling/Re-skilling*).
3. Perluasan program pemagangan.
4. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihan vokasi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Yassierli**  
**Kementerian Ketenagakerjaan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

#### Faktor Positif

- Revitalisasi BLK menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meski keberhasilannya belum merata;
- Program magang dan pelatihan kerja untuk generasi muda (terutama *fresh graduate* dan Gen Z) dinilai potensial untuk mengurangi pengangguran;
- Peningkatan *skill* pelatih dan modernisasi metode pelatihan di beberapa daerah mulai tampak;
- Adanya digitalisasi sektor ketenagakerjaan menyangkut data dan informasi lowongan kerja;
- Beberapa inisiatif *upskilling* dan *reskilling* diarahkan pada sektor masa depan (teknologi digital dan ekonomi hijau).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Yassierli**  
**Kementerian Ketenagakerjaan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Kasus korupsi di jajaran pimpinan (Wamenaker) menurunkan kredibilitas kelembagaan dan kepercayaan publik;
- Program BLK belum berkelanjutan (keberlanjutan rendah) dan tidak semua peserta berhasil terserap di dunia kerja;
- Kualitas pelatihan tidak merata, terutama di luar Jawa dan di sektor-sektor tradisional;
- Belum ada peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi buruh terdampak PHK;
- Tingkat pengangguran masih tinggi, khususnya di kalangan muda dan lulusan baru;
- Koordinasi dengan dunia industri lemah, sehingga banyak pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar (*mismatch skills*);
- Kebijakan digitalisasi masih terbatas pada birokrasi, belum menjadi platform pelayanan tenaga kerja yang efektif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Yassierli Kementerian Ketenagakerjaan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Reformasi dan keberlanjutan BLK nasional;
- Upaya penurunan pengangguran struktural dan generasi muda;
- Sinergi antara pelatihan, industri, dan pendidikan vokasi;
- Pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola internal;
- Penguatan digitalisasi sistem tenaga kerja dan proteksi buruh;
- Transformasi kebijakan tenaga kerja menuju *green jobs* dan ekonomi digital.

#### Rekomendasi

1. Perkuat keberlanjutan program BLK dengan model *demand-driven* berbasis kebutuhan industri, bukan hanya target administratif.
2. Bangun kemitraan strategis dengan industri nasional dan global untuk memperluas magang, penempatan kerja, dan *job matching*.
3. Percepat digitalisasi data tenaga kerja dan kembangkan *national labor information system* yang terintegrasi.
4. Perluas program *upskilling & reskilling* untuk sektor masa depan seperti energi hijau, manufaktur canggih, dan teknologi informasi.
5. Tegakkan integritas kelembagaan dengan pemberantasan korupsi dan transparansi anggaran di semua level.
6. Dorong penciptaan lapangan kerja lokal berbasis ekonomi kreatif dan UMKM daerah agar dampaknya langsung terasa.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Mukhtarudin Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

#### Program

1. Program pelatihan dan edukasi migrasi aman masih berjalan dan membantu calon PMI memahami prosedur legal;
2. Desa Migran Emas dinilai sebagai inovasi potensial untuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas migran;
3. Kasus tenaga migran bermasalah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
4. Kolaborasi lintas kementerian (Kemenlu, Kemenaker, KemenPPA) mulai dibangun, memperkuat ekosistem migrasi yang lebih terintegrasi;
5. Pendekatan holistik BP2MI mencakup pelatihan, penempatan, hingga perlindungan dianggap arah kebijakan yang tepat untuk jangka panjang.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Mukhtarudin**  
**Kementerian PPM/BP2MI**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,87 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program pelatihan dan edukasi migrasi aman masih berjalan dan membantu calon PMI memahami prosedur legal;
- Desa Migran Emas dinilai sebagai inovasi potensial untuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas migran;
- Kasus tenaga migran bermasalah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;

- Kolaborasi lintas kementerian (Kemenlu, Kemenaker, KemenPPA) mulai dibangun, memperkuat ekosistem migrasi yang lebih terintegrasi;
- Pendekatan holistik BP2MI mencakup pelatihan, penempatan, hingga perlindungan dianggap arah kebijakan yang tepat untuk jangka panjang.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Mukhtarudin**  
**Kementerian PPM/BP2MI**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Perlindungan pekerja migran di luar negeri masih lemah; banyak kasus kekerasan, eksploitasi, dan deportasi;
- Jumlah PMI ilegal masih tinggi, menunjukkan lemahnya pengawasan dan edukasi prapenempatan;
- Program target 425 ribu PMI dianggap berorientasi pada angka, bukan kualitas dan kesejahteraan pekerja;
- Skala implementasi program Desa Migran Emas masih kecil dan belum berdampak signifikan;
- Sosialisasi dan publikasi program minim, menyebabkan banyak masyarakat tidak tahu peran atau kinerja BP2MI;
- Koordinasi dengan daerah dan negara tujuan kerja masih lemah; sering kali PMI tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai;
- Kementerian cenderung reaktif terhadap kasus, bukan preventif melalui sistem perlindungan berbasis data dan teknologi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Mukhtarudin**  
**Kementerian PPM/BP2MI**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Perlindungan hukum dan sosial PMI di luar negeri;
- Penanganan pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia;
- Peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi calon PMI;
- Sinergi lintas kementerian dan diplomasi tenaga kerja;
- Penguatan Desa Migran Emas sebagai model pemberdayaan ekonomi;
- Digitalisasi sistem penempatan dan perlindungan PMI.

#### Rekomendasi

1. Perkuat perlindungan PMI di luar negeri melalui perwakilan khusus, legal aid center, dan kerja sama bilateral yang jelas dengan negara penempatan.
2. Kembangkan sistem digital migrasi aman yang memantau perjalanan PMI dari pelatihan hingga kepulangan.
3. Skalikan program Desa Migran Emas menjadi proyek nasional pemberdayaan berbasis remitansi dan wirausaha keluarga PMI.
4. Perketat pengawasan terhadap calo dan jalur migrasi ilegal dengan pendekatan hukum dan pemberdayaan komunitas.
5. Reorientasikan target PMI dari kuantitas ke kualitas, fokus pada pekerjaan formal, aman, dan bermartabat.
6. Bangun sistem integrasi data lintas lembaga (BP2MI–Kemenlu–Imigrasi–BPS) untuk pemetaan dan intervensi berbasis bukti.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

**Agus Gumiwang Kartasasmita**

# Kementerian Perindustrian



### Program

1. Pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri.
2. Fasilitasi pengembangan industri halal, sertifikasi halal.
3. Memperkuat Industri Kecil dan Menengah.
4. Memperluas pelatihan vokasi, pendidikan industri, pelatihan kerja untuk SDM.
5. Menambah nilai tambah bahan baku domestik.
6. Mendukung peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa industri.
7. Pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan industri.
8. Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
9. Memindahkan entry point impor beberapa komoditas seperti elektronik, TPT, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, obat tradisional ke Indonesia/Indonesia Timur.
10. Regulasi yang mengatur harga dan pasokan gas bumi untuk kebutuhan industri, termasuk HGBT.
11. Program pembiayaan (kredit) untuk mendukung usaha padat karya.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Agus Gumiwang Kartasasmita Kementerian Perindustrian

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

3,03 (sedang)

##### Faktor Positif

- Fokus pada pengembangan kawasan industri dan *quick wins* seperti percepatan infrastruktur kawasan dinilai efektif;
- Program TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) membantu substitusi impor, khususnya di sektor energi dan telekomunikasi;
- Kebijakan industri hijau dan ramah lingkungan mulai diarusutamakan, sejalan dengan tren global dekarbonisasi;
- Perluasan ekspor manufaktur tetap berjalan meski dihadang hambatan global seperti bea cukai Amerika Serikat;
- Komitmen terhadap pengembangan industri halal diakui sebagai langkah strategis menghadapi potensi pasar muslim dunia;
- Pelaksanaan program di tahun pertama pemerintahan cukup stabil dan disiplin.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Agus Gumiwang Kartasasmita Kementerian Perindustrian

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Akses pembiayaan industri kecil dan menengah masih sulit, membuat daya saing IKM lemah;
- Pengembangan industri halal terhambat oleh biaya sertifikasi mahal dan prosedur panjang;
- Produktivitas industri kecil-menengah rendah karena keterbatasan teknologi dan pelatihan tenaga kerja.
- Program hilirisasi belum maksimal, terutama di sektor minerba dan agroindustri;
- Kebijakan TKDN sering berubah, membuat investor dan produsen bingung;
- Koordinasi antarkementerian belum efektif, sehingga Kemenperin tampak tumpang tindih dengan Kementerian Koperasi, BKPM, dan Kementerian Perdagangan;
- Minim komunikasi publik, banyak masyarakat tidak mengetahui arah kebijakan Kementerian Perindustrian;
- Belum ada terobosan besar yang benar-benar meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Agus Gumiwang  
Kartasasmita  
Kementerian  
Perindustrian**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Hilirisasi industri sumber daya alam (minerba, agro, energi);
- Industri halal dan sertifikasi nasional;
- Industri hijau dan transisi energi;
- Peningkatan daya saing IKM dan akses pembiayaan;
- Stabilitas regulasi TKDN dan kemudahan investasi industri;
- Penguatan rantai pasok domestik dan keterkaitan antarindustri.

#### Rekomendasi

1. Percepat hilirisasi industri nasional melalui kemitraan publik-swasta dan insentif fiskal untuk industri berbasis sumber daya alam.
2. Permudah akses pembiayaan dan insentif fiskal untuk IKM, agar tidak hanya industri besar yang tumbuh.
3. Perkuat ekosistem industri halal nasional dengan menurunkan biaya sertifikasi dan mempercepat proses standardisasi.
4. Stabilkan kebijakan TKDN dan percepat harmonisasi regulasi antar-K/L, agar investor memiliki kepastian hukum.
5. Dorong adopsi teknologi digital dan efisiensi energi di industri kecil dan menengah untuk masuk ke rantai pasok global.
6. Tingkatkan transparansi dan komunikasi publik, agar masyarakat dan pelaku usaha memahami arah dan capaian program industri nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Budi Santoso**

# Kementerian Perdagangan

## Program

1. Pengamanan pasar domestik.
2. Perluasan ekspor.
3. Pemberdayaan UMKM ekspor.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Budi Santoso**  
**Kementerian Perdagangan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,08 (sedang)

#### Faktor Positif

- Pasar domestik relatif stabil, harga kebutuhan pokok terkendali, dan distribusi logistik cukup lancar;
- Kementerian Perdagangan aktif mempercepat perjanjian perdagangan internasional antarnegara dan antarkawasan (FTA, CEPA);
- Upaya membuka pasar ekspor baru bagi produk pertanian, perikanan, dan UMKM patut diapresiasi;
- Program digitalisasi perdagangan seperti Pasar Digital (PaDi) mulai memperluas kanal ekspor UMKM;
- Respons cepat terhadap isu tarif dan sanksi perdagangan global menunjukkan kesiapsiagaan kebijakan;
- Kementerian mulai terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha dan industri.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Budi Santoso** **Kementerian Perdagangan**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Faktor Negatif**

- Kinerja ekspor belum berdampak nyata, terutama akibat hambatan global dan lemahnya strategi promosi dagang;
- Pengamanan pasar domestik lemah, terlihat dari banjir produk impor murah yang menekan industri lokal;
- Pemberdayaan UMKM ekspor masih terbatas, sebagian besar belum mampu menembus pasar global karena kendala sertifikasi, logistik, dan kualitas;
- Kebijakan perdagangan terkesan tidak sinkron dengan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, dan BKPM;
- Kurangnya sosialisasi dan komunikasi publik, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui capaian kementerian;
- Strategi menghadapi kebijakan proteksionisme global (misal tarif Trump) masih lemah dan belum menghasilkan alternatif pasar yang kuat;
- Masih miskin inovasi dan terobosan strategis dalam memperkuat daya saing produk nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Budi Santoso**  
**Kementerian**  
**Perdagangan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Perluasan ekspor dan diversifikasi pasar nontradisional;
- Perlindungan pasar domestik dari impor berlebih;
- Pemberdayaan dan digitalisasi UMKM ekspor;
- Konsolidasi kebijakan lintas sektor perdagangan, industri, dan investasi;
- Transformasi logistik dan rantai pasok nasional.

#### Rekomendasi

1. Bangun strategi ekspor jangka panjang dengan fokus pada diversifikasi pasar dan produk bernilai tambah tinggi.
2. Perkuat pengamanan pasar domestik melalui pengetatan pengawasan impor dan penegakan standar mutu produk.
3. Perluas dan sederhanakan dukungan ekspor bagi UMKM, termasuk fasilitasi sertifikasi, pembiayaan ekspor, dan platform digital global.
4. Kembangkan diplomasi dagang proaktif untuk mengantisipasi dampak kebijakan proteksionisme negara mitra.
5. Sinkronkan kebijakan lintas kementerian (Kemendag–Kemenperin–Kemenkeu–BKPM) untuk menciptakan ekosistem ekspor yang solid.
6. Dorong transformasi perdagangan berbasis teknologi dan logistik pintar, agar rantai distribusi lebih efisien dan kompetitif.



**Bahlil Lahadalia**

## **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **Program**

- 1.** Akselerasi hilirisasi sektor mineral dan batubara (Minerba).
- 2.** Perbaikan tata kelola perizinan minerba.
- 3.** Pengelolaan subsidi dan penegakan hukum yang tegas.
- 4.** Ketahanan energi dan swasembada energi.
- 5.** Peningkatan produksi (eksplorasi dan eksploitasi).
- 6.** Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi.
- 7.** Lingkungan dan keberlanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Bahlil Lahadalia** **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Kategori Penilaian**

2,74 (sedang)

##### **Faktor Positif**

- Program hilirisasi minerba, terutama nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, berhasil meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar Indonesia di pasar global;
- Kebijakan satu pintu impor BBM menjadi langkah administratif penting untuk efisiensi distribusi energi;
- Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai berjalan untuk mengurangi tambang ilegal;
- Kebijakan energi nasional mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam;
- Produksi migas meningkat di beberapa blok strategis meskipun belum signifikan secara nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Bahlil Lahadalia** **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Faktor Negatif**

- Isu lingkungan serius: banyak tambang merusak ekosistem (misalnya kasus Raja Ampat), sementara kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan;
- Transisi energi bersih lambat; ketergantungan pada batu bara masih tinggi dan *roadmap* energi hijau belum jelas;
- Subsidi energi tidak tepat sasaran, sering menyebabkan inefisiensi fiskal dan distorsi harga;
- Sistem informasi dan data sektor energi dan mineral lemah, menyebabkan tumpang tindih perizinan, celah korupsi, dan lemahnya pengawasan penerimaan negara;
- Kasus korupsi dan oligarki pertambangan menurunkan kredibilitas kebijakan hilirisasi;
- Koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dalam tata kelola lahan, kehutanan, dan mineral;
- Kinerja komunikasi publik Menteri ESDM dinilai retorik dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Bahlil Lahadalia** **Kementerian Energi dan** **Sumber Daya Mineral**

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Perbaiki tata kelola dan transparansi sektor energi–minerba;
- Implementasi transisi energi berkeadilan dan pengurangan emisi karbon;
- Penyelesaian konflik lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan;
- Reformasi perizinan berbasis sistem data digital terpadu;
- Pemberantasan korupsi dan oligopoli dalam sektor energi;
- Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan industri hijau.

#### Rekomendasi

1. Bangun sistem data dan perizinan energi–minerba terpadu nasional (One Data ESDM) untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penerimaan negara.
2. Percepat transisi energi hijau dengan peta jalan jelas, target tahunan, dan insentif bagi investor EBT.
3. Perketat pengawasan lingkungan melalui sistem audit lingkungan independen dan sanksi tegas bagi pelanggar.
4. Tingkatkan sinergi antar-K/L (ESDM–KLHK–Investasi–BUMN) dalam pengelolaan energi dan pertambangan.
5. Reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan mendorong efisiensi energi.
6. Dorong hilirisasi berkelanjutan, tidak hanya pada nikel, tetapi juga bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang.
7. Tingkatkan transparansi publik dan komunikasi kebijakan berbasis data, bukan sekadar wacana politik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Dody Hanggodo**

# Kementerian Pekerjaan Umum

## Program

1. Efisiensi Infrastruktur infrastruktur sebagai Enabler enabler Pertumbuhan pertumbuhan Ekonomiekonomi.
2. Pembangunan Sektor sektor Sumber Daya Air & dan Irigasiirigasi.
3. Pembangunan Infrastruktur infrastruktur Jalan jalan dan& Jembatanjembatan.
4. Cipta Karya karya dan Sanitasi sanitasi air minum SPAM.
5. Penyediaan rusun dan hunian vertikal (meliputi IKN, Rusun ASN/Hankam).
6. percepatan pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan cetak sawah dan agenda renovasi sekolah.
7. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Dody Hanggodo Kementerian Pekerjaan Umum

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,03 (sedang)

#### Faktor Positif

- Pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan berjalan cukup baik, terutama proyek lanjutan era sebelumnya;
- Program air bersih, sanitasi, dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) mulai dirasakan manfaatnya di beberapa kota dan kabupaten;

- Rumah vertikal dan perumahan rakyat mulai dikembangkan sebagai solusi keterbatasan lahan perkotaan;
- Kementerian bekerja lugas dan efisien, dengan reputasi teknokratik dan jarang menimbulkan kontroversi politik;
- Kontribusi terhadap konektivitas nasional dan logistik cukup signifikan, mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Dody Hanggodo** **Kementerian Pekerjaan Umum**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Faktor Negatif**

- Minim inovasi dan terobosan kebijakan baru, sebagian besar program merupakan kelanjutan pemerintahan sebelumnya;
- Efisiensi anggaran yang ketat menyebabkan banyak proyek tertunda atau berkurang skalanya;
- Kesenjangan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terpencil) masih besar;
- Ketergantungan pada BUMN Karya dalam proyek irigasi dan infrastruktur besar menimbulkan masalah, termasuk proyek gagal dan utang menumpuk;
- Kurangnya transparansi dan sosialisasi program, masyarakat sulit mengakses informasi capaian nyata kementerian;
- Orientasi proyek masih top-down, lebih banyak pada proyek mercusuar ketimbang infrastruktur dasar di pedesaan;
- Pengawasan pelaksanaan proyek perlu diperkuat, agar kualitas dan ketepatan waktu tidak dikorbankan demi efisiensi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Dody Hanggodo Kementerian Pekerjaan Umum

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah;
- Reformasi sistem pelaksanaan proyek dan peran BUMN Karya;
- Penguatan infrastruktur dasar (air, irigasi, sanitasi, perumahan rakyat);
- Efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas proyek;
- Inovasi teknologi konstruksi dan pembangunan berkelanjutan.

#### Rekomendasi

1. Alihkan sebagian fokus dari proyek besar ke infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat desa dan 3T.
2. Tingkatkan pengawasan dan audit BUMN Karya, terutama dalam proyek irigasi dan air bersih, untuk mencegah kegagalan proyek dan utang menumpuk.
3. Perkuat pembangunan irigasi dan bendungan pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
4. Dorong inovasi teknologi konstruksi ramah lingkungan dan efisiensi energi di proyek infrastruktur.
5. Kembangkan model pembiayaan kreatif (Public-Private Partnership) agar tidak tergantung sepenuhnya pada APBN.
6. Pastikan pemerataan pembangunan, agar manfaat infrastruktur tidak hanya dinikmati kawasan industri atau perkotaan besar.



**Maruarar Sirait**

## **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**

### **Program**

- 1.** Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- 2.** Pengawasan internal dan layanan masyarakat.
- 3.** Pembangunan hunian vertikal dan rumah khusus.
- 4.** Digitalisasi perumahan dan pemetaan RTLH.
- 5.** Program 3 juta rumah dan pagu anggaran 2026.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Maruarar Sirait** **Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

#### **Kategori Penilaian**

2,77 (sedang)

#### **Faktor Positif**

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) membantu sebagian masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah menjadi layak huni;
- Konsep hunian vertikal di wilayah padat perkotaan dianggap solusi yang tepat untuk efisiensi lahan dan mengatasi backlog perumahan;
- Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo menunjukkan adanya arah politik pembangunan sosial;
- Kementerian menunjukkan niat baik untuk mendorong integrasi antara sektor perumahan, pembiayaan, dan kawasan permukiman.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Maruarar Sirait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Program 3 Juta Rumah belum jelas progres dan realisasinya, tidak ada data publik yang transparan;
- Tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian PUPR dan lembaga lain membuat pelaksanaan tidak efektif;
- Belum ada strategi konkret terkait pembebasan lahan, pembiayaan rumah subsidi, dan integrasi kawasan;
- Pelaksanaan program masih bersifat seremonial dan politis, tanpa kajian realistis terhadap daya beli masyarakat;
- Program TAPERA dinilai tidak efektif dan berpotensi salah sasaran;
- Keterbatasan anggaran dan birokrasi lambat menghalangi pencapaian target nasional;
- Pengawasan kualitas bangunan lemah, banyak proyek yang tidak berkelanjutan atau tidak dimanfaatkan;
- Minim digitalisasi dan transparansi data perumahan membuat monitoring sulit dilakukan;
- Kurangnya sinergi antara menteri dan wakil menteri menyebabkan arah kebijakan tidak solid.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Maruarar Sirait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- *Backlog* perumahan nasional (defisit rumah layak huni mencapai  $\pm 12$  juta unit);
- Efisiensi lahan perkotaan dan pengembangan hunian vertikal;
- Integrasi perumahan rakyat dengan kebijakan tata ruang dan transportasi publik;
- Skema pembiayaan perumahan yang inklusif (termasuk syariah dan kredit mikro);
- Revitalisasi rumah kosong dan kawasan kumuh perkotaan;
- Sinergi kelembagaan antar-K/L di bidang perumahan dan permukiman.

#### Rekomendasi

1. Perjelas peta jalan Program 3 Juta Rumah dengan indikator capaian, pembagian peran K/L, dan publikasi data secara berkala.
2. Prioritaskan hunian vertikal dan rumah sewa murah di wilayah urban padat penduduk.
3. Reformasi kelembagaan dan tata kelola, hindari tumpang tindih dengan Kementerian PUPR dan BUMN perumahan.
4. Integrasikan kebijakan perumahan dengan transportasi publik dan tata ruang kota agar tidak menimbulkan urban sprawl.
5. Manfaatkan rumah kosong dan aset negara idle untuk dijadikan hunian sosial melalui mekanisme sewa jangka panjang.
6. Kembangkan pembiayaan inovatif melalui kolaborasi dengan bank syariah, lembaga mikro, dan CSR perusahaan besar.
7. Perkuat sistem pengawasan dan digitalisasi data perumahan nasional, termasuk pelaporan BSPS dan TAPERA.



**Yandri Susanto**

## **Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**

### **Program**

1. BUMDes untuk gizi lebih baik, menyediakan makanan bergizi gratis melalui BUMDes.
2. Swasembada pangan desa mandiri, ketahanan pangan melalui pelatihan, infrastruktur, dan pemasaran.
3. Energi terbarukan di desa, mengelola potensi energi lokal seperti listrik tenaga surya dan biomassa.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Yandri Susanto** **Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**

#### **Program**

4. Air bersih untuk semua Desa, bangun sumur bor, tangki penampung, dan saluran distribusi air.
5. Desa Ekspor, membangkitkan produk unggulan desa untuk pasar global.
6. Pemuda sebagai pelopor perubahan, pelatihan kewirausahaan dan kompetisi inovasi bagi pemuda desa.
7. Integrasi program lintas sektor, kolaborasi lintas kementerian untuk efektivitas pelaksanaan.
8. Digitalisasi desa dan desa wisata, akses internet dan promosi pariwisata berbasis digital.
9. Investasi ke desa, dorong investasi korporasi dan global, siapkan proposal desa.
10. Transparansi dana desa, kelola dan laporkan penggunaan dana secara partisipatif dan terbuka.
11. Ketangguhan terhadap iklim dan bencana, pelatihan mitigasi dan sistem peringatan dini bagi masyarakat desa.
12. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemetaan dan intervensi prioritas berdasarkan kondisi setempat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Yandri Susanto Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,96 (sedang)

##### Faktor Positif

- Dana desa dan koperasi desa memberi dukungan ekonomi lokal, terutama untuk kegiatan produktif kecil di beberapa daerah;
- Digitalisasi desa dan program desa wisata mulai membuka peluang ekonomi baru di wilayah perdesaan;

- Kerja sama Kemendes dengan BPS untuk membangun ekosistem data desa terintegrasi merupakan langkah strategis untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy);
- Program pemberdayaan pemuda desa dan pengembangan SDM dianggap penting untuk jangka panjang;
- Sinergi dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam agenda “membangun dari desa”, menunjukkan posisi kementerian yang strategis.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Yandri Susanto Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Pengelolaan dana desa masih bermasalah: korupsi, penyalahgunaan, dan kurangnya transparansi di banyak daerah;
- Program bombastis Desa Wisata belum memiliki dampak nyata dan cenderung seremonial;
- Pendamping Desa belum efektif, bahkan dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perencanaan dan akuntabilitas desa;
- Kelemahan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lain (Pariwisata, UMKM, Bappenas, PUPR) menghambat implementasi;
- Kinerja birokrasi lambat dan belum ada terobosan berarti dalam tata kelola pembangunan desa;
- Keterbatasan kapasitas aparatur desa menyebabkan dana desa tidak produktif, hanya digunakan untuk proyek fisik jangka pendek;
- Belum ada inovasi sistematis dalam pengawasan dan audit penggunaan dana desa;
- Kurangnya partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Yandri Susanto Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Transparansi dan akuntabilitas dana desa;
  - Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pendamping profesional;
  - Peningkatan efektivitas program BUMDes dan koperasi desa;
  - Digitalisasi tata kelola desa dan integrasi data kemiskinan;
- Sinkronisasi program antar-K/L agar tidak tumpang tindih;
  - Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan sumber daya alam berkelanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Yandri Susanto Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Rekomendasi

1. Bangun sistem transparansi dana desa berbasis digital dan terbuka (dasbor publik) agar masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran.
2. Reformasi sistem pendamping desa dengan rekrutmen berbasis kompetensi dan hasil kinerja, bukan sekadar administratif.
3. Perkuat sinergi antara Kementerian Desa, BPS, dan Bappenas untuk memastikan pembangunan desa berbasis data akurat dan terukur.
4. Fokuskan program pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal, bukan hanya proyek infrastruktur fisik.
5. Kembangkan BUMDes dan koperasi desa berbasis rantai nilai unggulan daerah (pertanian, wisata, perikanan, energi terbarukan).
6. Tegakkan pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan dana desa melalui kerja sama dengan KPK dan BPKP.
7. Hentikan pendekatan seremonial dan politis, beralih ke kebijakan yang berbasis pemberdayaan dan partisipasi warga.



Iftitah Sulaiman Suryanagara

## Kementerian Transmigrasi

### Program

1. Penyelesaian masalah legalitas lahan, seperti sengketa dan sertifikasi, untuk memberikan kepastian hak bagi transmigran.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan transmigrasi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transmigran melalui beasiswa pendidikan tinggi dan pelatihan bagi generasi muda.
4. Menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
5. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membangun kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Iftitah Sulaiman Suryanagara**  
**Kementerian Transmigrasi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,83 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program beasiswa dan peningkatan kapasitas transmigran diapresiasi karena memberi peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan transmigrasi;
- Upaya penyelesaian konflik agraria dan legalitas lahan transmigrasi melalui koordinasi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki tata kelola;

- Beberapa program pemberdayaan ekonomi transmigran mulai berjalan meski skalanya terbatas;
- Ada inisiatif pemerataan pendidikan dan pelatihan untuk siswa dari daerah terluar.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Iftitah Sulaiman Suryanagara**  
**Kementerian Transmigrasi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Kinerja kementerian tidak terdengar secara publik, banyak masyarakat bahkan tidak mengetahui program yang dijalankan;
- Konflik lahan antara transmigran dan warga lokal masih sering terjadi, terutama di kawasan hutan dan wilayah adat;
- Minimnya infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi (jalan, air bersih, fasilitas sosial) membuat banyak kawasan stagnan;
- Kementerian belum memiliki visi baru yang relevan dengan tantangan masa kini; masih

terjebak pada paradigma pemindahan penduduk, bukan pembangunan wilayah terpadu;

- Koordinasi lintas sektor lemah, terutama dengan Kementerian ATR/BPN;
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyelesaian tata ruang dan lahan;
- Pendekatan pembangunan transmigrasi tidak holistik, sering mengabaikan integrasi sosial dan ekonomi antara transmigran dan warga lokal;
- Kurangnya sosialisasi dan publikasi program.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Iftitah Sulaiman Suryanagara**  
**Kementerian Transmigrasi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Penyelesaian konflik agraria dan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan;
- Revitalisasi konsep transmigrasi menjadi model pembangunan wilayah terpadu dan berkelanjutan;
- Integrasi sosial antara transmigran dan warga lokal;
- Peningkatan kapasitas SDM dan ekonomi transmigran;
- Infrastruktur dasar dan layanan publik di kawasan transmigrasi;
- Koordinasi lintas kementerian dan daerah.

#### Rekomendasi

1. Redefinisi misi transmigrasi dari sekadar relokasi penduduk menjadi *regional development strategy* yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Bangun peta jalan penyelesaian lahan transmigrasi secara nasional, bekerja sama dengan ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Tingkatkan kesejahteraan transmigran melalui pelatihan wirausaha, koperasi desa, dan akses pembiayaan mikro.
4. Kembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan kawasan industri atau pertanian modern.
5. Perkuat dialog sosial dengan masyarakat lokal untuk mencegah konflik dan meningkatkan harmoni sosial.
6. Gunakan pendekatan data spasial dan digitalisasi kawasan transmigrasi untuk perencanaan dan monitoring berbasis bukti.
7. Perkuat fungsi publikasi dan komunikasi kebijakan, agar kementerian kembali relevan di mata masyarakat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Dudy Purwagandhi**

# Kementerian Perhubungan

## Program

1. Optimasi layanan transportasi publik dan anggaran.
2. Penguatan konektivitas nasional dan ketahanan pangan.
3. Peningkatan keselamatan dan pemanfaatan teknologi.
4. Pelayanan publik dan komitmen BPK.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Dudy Purwagandhi Kementerian Perhubungan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,02 (sedang)

#### Faktor Positif

- Pelayanan transportasi publik (KRL, kereta api, bandara, dan pelabuhan utama) dinilai masih berjalan baik, terutama di kawasan perkotaan dan jalur utama;
- Infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan kereta api terus ditingkatkan, memperluas konektivitas nasional dan menurunkan biaya logistik;

- Program Tol Laut dan penguatan jaringan udara regional mulai terasa dampaknya di beberapa wilayah timur Indonesia;
- Perhatian pada keselamatan dan layanan publik meningkat, meski masih belum merata;
- Kementerian Perhubungan tetap konsisten sebagai kementerian teknis yang efisien dan stabil secara administratif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Dudy Purwagandhi**  
**Kementerian Perhubungan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Belum ada terobosan besar dalam kebijakan transportasi nasional, terutama di bidang transportasi hijau, digitalisasi, dan integrasi antarmoda;
- Masalah konektivitas antarwilayah di luar Jawa masih besar, termasuk keterbatasan akses di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar);
- Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi, terutama di kota besar;
- Transportasi publik di luar Jakarta masih minim, tidak terintegrasi, dan kurang nyaman;
- Aspek keselamatan transportasi laut dan udara masih menjadi titik lemah, sering muncul insiden fatal karena lemahnya pengawasan;
- Kebijakan kendaraan listrik dan transportasi daring belum terintegrasi dengan baik, menimbulkan kebingungan regulasi;
- Keterbatasan anggaran menghambat inovasi dan pemerataan pembangunan layanan transportasi di daerah.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Dudy Purwagandhi**  
**Kementerian**  
**Perhubungan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Integrasi sistem transportasi nasional (darat, laut, udara, dan rel);
- Transportasi hijau dan transisi energi di sektor perhubungan;
- Reformasi keselamatan transportasi dan budaya disiplin lalu lintas;
- Konektivitas dan akses transportasi di luar Pulau Jawa;
- Efisiensi logistik nasional melalui digitalisasi dan konektivitas pelabuhan.

#### Rekomendasi

1. Percepat pengembangan sistem transportasi terintegrasi nasional, termasuk koneksi antarmoda dan digitalisasi tiket/logistik.
2. Tingkatkan pemerataan pembangunan transportasi publik di luar Jawa dan perkuat konektivitas daerah 3T.
3. Fokus pada keselamatan transportasi darat, laut, dan udara dengan pengawasan ketat dan peningkatan kapasitas SDM operator.
4. Dorong transportasi hijau dan ramah lingkungan melalui elektrifikasi armada publik dan insentif transportasi berkelanjutan.
5. Reformasi tata kelola proyek infrastruktur transportasi agar tidak terjebak kepentingan politik, tetapi berbasis kajian kebutuhan wilayah.
6. Optimalkan program Tol Laut dan Tol Udara untuk mendukung distribusi pangan dan ketahanan logistik nasional.
7. Tingkatkan sosialisasi dan komunikasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan transportasi nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

**Meutya Hafid**

# Kementerian Komunikasi dan Digital



### Program

1. Penataan internal dan reformasi organisasi.
2. Penyusunan dan penyelesaian RPP Perlindungan Data Pribadi (PDP).
3. Perluasan dan pemerataan konektivitas digital di wilayah 3T.
4. Pembangunan dan ekspansi Pusat Data Nasional (PDN).
5. Pendirian fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi (Digital Test House) untuk pengakuan kualitas perangkat secara internasional.
6. Penerapan SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten).
7. Transformasi digital layanan publik dan E-Government.
8. Penguatan literasi digital dan *digital talent*.
9. Diplomasi digital dan kerja sama internasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Meutya Hafid Kementerian Komunikasi dan Digital

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

#### Faktor Positif

- Perluasan infrastruktur digital nasional (akses internet di daerah terpencil dan Palapa Ring) dinilai mulai membuka peluang ekonomi digital di daerah 3T;
- Program literasi digital di sekolah, kampus, dan komunitas berjalan cukup baik dan mendapat apresiasi;
- Inisiatif pengaturan usia pengguna media sosial dan perlindungan konsumen digital menunjukkan keberanian regulatif;
- Digitalisasi layanan publik di bidang kesehatan, kependudukan, dan UMKM mulai dirasakan manfaatnya;
- Kementerian aktif dalam menyusun regulasi perlindungan data pribadi dan berusaha mempercepat ekosistem hukum digital;
- Upaya kolaboratif dengan operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet nasional terus dilakukan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Meutya Hafid**  
**Kementerian Komunikasi dan Digital**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Masih banyak kebocoran data pribadi, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, yang belum ditangani secara serius;
- Pemberantasan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal tidak efektif, situs-situs serupa muncul kembali setelah diblokir;
- Komitmen keamanan siber masih lemah, tidak ada sistem terpadu untuk melindungi data dan transaksi digital warga;
- Regulasi sering reaktif, belum berorientasi strategis terhadap perkembangan industri digital;
- Masih banyak wilayah blank spot, terutama di Indonesia bagian timur, yang tertinggal dari revolusi digital;
- Kementerian tertinggal dari kecepatan industri digital swasta, sehingga kebijakan sering dianggap ketinggalan zaman;
- Kurangnya transparansi dan komunikasi publik, termasuk dalam kasus-kasus kebocoran data besar dan isu sensor media sosial;
- Kritik terhadap kontrol negara atas media sosial dan potensi pembatasan kebebasan berekspresi memperburuk citra kementerian.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Meutya Hafid Kementerian Komunikasi & Digital

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Pemberantasan judi *online* dan pinjaman ilegal berbasis digital;
- Perlindungan data pribadi dan keamanan siber nasional;
- Perluasan akses internet merata di seluruh wilayah Indonesia;
- Literasi digital dan etika bermedia sosial;
- Peningkatan kapasitas SDM digital pemerintah;
- Regulasi dan tata kelola industri digital yang adaptif dan transparan.

##### Rekomendasi

1. Bangun sistem keamanan data nasional terpadu berbasis *cyber resilience center* untuk mencegah dan merespons kebocoran data.
2. Perkuat tim siber dan kerja sama lintas lembaga (OJK, BSSN, Kepolisian) untuk memberantas judi *online* dan pinjol ilegal secara sistemik.
3. Dorong literasi digital kritis dan etis di sekolah, kampus, serta komunitas melalui kurikulum dan kampanye nasional.
4. Percepat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tindak tegas pelanggaran data baik oleh pemerintah maupun swasta.
5. Pastikan perluasan infrastruktur digital merata hingga ke pelosok melalui kombinasi fiber optik, satelit, dan jaringan 5G nasional.
6. Tingkatkan kapasitas SDM digital pemerintah, agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan industri.
7. Hindari kontrol berlebihan atas ruang digital, dan kembangkan kebijakan yang melindungi kebebasan berekspresi sekaligus keamanan publik.



**Amran Sulaiman**

## **Kementerian Pertanian**

### **Program**

1. Peningkatan produksi padi dan jagung.
2. Optimalisasi lahan seluas 350 ribu hektare.
3. Peningkatan produksi susu dan daging sapi.
4. Cetak sawah seluas 750 ribu hektare.
5. Penyediaan benih unggul.
6. Penyediaan alat dan mesin pertanian dan pupuk bersubsidi.
7. Pengembangan pertanian milenial (modern).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Amran Sulaiman**  
**Kementerian Pertanian**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,21 (sedang)

#### Faktor Positif

- Produksi padi meningkat, dan beberapa indikator menunjukkan surplus beras nasional hingga 3,7 juta ton (data awal September);
- Distribusi pupuk membaik di sejumlah wilayah, petani mulai merasakan perbaikan akses terhadap sarana produksi;

- Program pertanian modern berbasis teknologi seperti penggunaan *drone* dan sistem irigasi cerdas mulai diterapkan di daerah-daerah tertentu;
- Harga hasil pertanian relatif stabil, meski belum merata antarwilayah;
- Kementan mempertahankan kontinuitas program pangan nasional dari pemerintahan sebelumnya, menjaga ketahanan pangan strategis;
- Perhatian terhadap kesejahteraan petani meningkat, dengan rencana anggaran besar (Rp40 triliun) yang diarahkan untuk produksi dan distribusi pangan nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Amran Sulaiman**  
**Kementerian Pertanian**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Ketergantungan impor komoditas pertanian (terutama kedelai, bawang putih, daging, dan gula) masih tinggi, menunjukkan belum tercapai kedaulatan pangan sejati;
- Fluktuasi harga pangan (cabai, beras, daging) masih sering terjadi akibat lemahnya sistem distribusi dan rantai pasok;
- Masalah pupuk bersubsidi belum sepenuhnya teratasi, masih terjadi kelangkaan dan penyaluran tidak tepat sasaran;
- Program cetak sawah baru dan perluasan lahan tidak efektif, banyak menuai kritik karena kurang mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan;
- Pertanian milenial dan agritech masih sebatas jargon, belum ada ekosistem pendukung yang kuat;
- Kementerian Pertanian dinilai belum berani melakukan reformasi kebijakan pupuk dan subsidi pertanian secara menyeluruh;
- Kritik muncul terhadap gaya kepemimpinan menteri yang dianggap arogan dan terlalu sentralistis dalam pengambilan kebijakan;
- Masih ada praktik pembukaan lahan dan konversi hutan untuk pertanian yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Amran Sulaiman**  
**Kementerian Pertanian**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Swasembada dan kedaulatan pangan nasional;
- Distribusi dan subsidi pupuk bersih dan efisien;
- Ketergantungan impor pangan strategis;
- Modernisasi pertanian dan regenerasi petani;
- Produktivitas lahan dan efisiensi rantai pasok pangan;
- Pertanian ramah lingkungan dan ketahanan iklim.

#### Rekomendasi

1. Fokus pada peningkatan produktivitas petani eksisting melalui teknologi dan efisiensi input, bukan sekadar perluasan lahan.
2. Reformasi sistem pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, transparan, dan berbasis data petani yang valid
3. Bangun sistem logistik pangan nasional untuk mengatasi fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan antarwilayah.
4. Perkuat ekosistem pertanian modern: riset bibit unggul, agritech, dan akses pembiayaan digital bagi petani muda.
5. Dorong integrasi dengan sektor peternakan dan perikanan dalam konsep food ecosystem berkelanjutan.
6. Kembangkan sistem pertanian sirkular dan organik lokal, terutama di desa-desa dengan potensi bahan alami.
7. Pastikan setiap desa memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan kapasitas digital dan teknis memadai.
8. Konsisten menjaga transparansi data produksi dan cadangan pangan, agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap klaim swasembada.



**Raja Juli Antoni**

## **Kementerian Kehutanan**

### **Program**

1. Digitalisasi Layanan: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata Kelola.
2. Penguasaan hutan yang berkeadilan.
3. Hutan sebagai sumber swasembada pangan.
4. Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia.
5. Indonesia Satu Peta (*One Map Policy*).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Raja Juli Antoni Kementerian Kehutanan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

3,12 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program Satu Peta (One Map Policy) dan penertiban kawasan hutan melalui Perpres No. 5/2025 dinilai langkah positif untuk memperjelas status lahan dan mengurangi konflik tata ruang;
- Pengakuan hutan sosial dan hutan adat mulai diperluas di beberapa wilayah, memberi ruang partisipasi masyarakat lokal;

- Upaya reformasi tata kelola izin kehutanan untuk mendorong iklim investasi yang lebih transparan mulai dijalankan, meski terbatas;
- Koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Investasi, ATR/BPN, dan KLHK menjadi sinyal perbaikan tata ruang nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Raja Juli Antoni Kementerian Kehutanan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Deforestasi dan degradasi hutan masih tinggi, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua akibat ekspansi sawit, tambang, dan proyek food estate;
- Konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi belum terselesaikan, bahkan cenderung meningkat karena tumpang tindih izin;
- Kementerian dinilai tidak memiliki inovasi baru, hanya melanjutkan kebijakan lama tanpa arah strategis yang jelas;
- Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan pembakaran lahan;
- Minim transparansi data dan komunikasi publik tentang kebijakan kehutanan dan konservasi;
- Tidak ada keberhasilan signifikan dalam penghentian konversi hutan lindung dan hutan primer.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Raja Juli Antoni**  
**Kementerian**  
**Kehutanan**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Konflik agraria dan pengakuan hak masyarakat adat;
- Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan;
- Tata kelola izin dan kepastian hukum kawasan hutan;
- Restorasi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati;
- Sinergi antara kehutanan dan investasi berkelanjutan;
- Penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan korporasi pelanggar.

#### Rekomendasi

1. Perkuat implementasi *One Map Policy* secara nyata hingga ke tingkat daerah untuk mencegah tumpang tindih izin dan konflik agraria.
2. Kembangkan sistem transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses perizinan dan pemantauan kawasan hutan.
3. Prioritaskan restorasi ekosistem dan rehabilitasi hutan kritis dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based forestry*).
4. Reformasi tata kelola izin industri ekstraktif (sawit, tambang, *food estate*) agar berorientasi pada keberlanjutan, bukan eksploitasi.
5. Percepat pengakuan hukum terhadap hutan adat dan hutan sosial sebagai upaya memperkuat hak masyarakat lokal.
6. Perketat penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan pelanggaran lingkungan, dengan pengawasan independen.
7. Kembangkan ekonomi hijau berbasis kehutanan, seperti ekowisata, jasa karbon, dan hutan energi terbarukan.
8. Bangun mekanisme pemantauan transparan berbasis data satelit yang dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas kementerian.



Sakti Wahyu Trenggono

## Kementerian Kelautan dan Perikanan

### Program

1. Perluasan kawasan konservasi laut.
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
3. Budi daya berkelanjutan.
4. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Penanganan sampah plastik laut.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Sakti Wahyu Trenggono Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,90 (sedang)

#### Faktor Positif

- Stabilitas produksi perikanan budidaya di sejumlah daerah masih terjaga, termasuk ikan darat dan air payau;
- Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) menjadi langkah positif untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewan;

- Upaya menjaga keberlanjutan laut melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta pengendalian illegal fishing terus dilakukan meski belum optimal;
- Kerja sama riset dan kebijakan RPJMN 2025–2029 menunjukkan integrasi antara program kelautan dan agenda swasembada pangan nasional;
- Modernisasi radar digital dan teknologi kelautan mulai diperkenalkan untuk meningkatkan keselamatan nelayan dan pengawasan laut.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Sakti Wahyu Trenggono Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Belum ada kebijakan besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir;
- Masalah reklamasi dan pemagaran pantai Jakarta (termasuk proyek PIK 2) menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir;
- Sampah laut, pencemaran pesisir, dan kerusakan terumbu karang belum menjadi prioritas yang nyata dalam kebijakan kementerian;
- Akses pasar dan izin tangkap untuk nelayan kecil masih sulit, mereka kalah bersaing dengan pelaku industri besar dan kapal asing;
- Masih maraknya praktik *illegal fishing* dan lemahnya pengawasan di zona ekonomi eksklusif (ZEE);
- Perlindungan tenaga kerja pelaut dan anak buah kapal (ABK) masih lemah, banyak kasus kekerasan dan eksploitasi;
- Koordinasi lintas kementerian kurang efektif, terutama dalam penataan ruang laut dan pengendalian reklamasi;
- Kementerian terkesan berjalan "*as usual*", tanpa inovasi berarti pascaera Susi Pudjiastuti yang dianggap publik visioner dan tegas.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Sakti Wahyu Trenggono Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Keadilan dan perlindungan bagi nelayan kecil dan tradisional;
- Pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut serta pesisir;
- *Illegal fishing* dan keamanan maritim;
- Reklamasi pantai dan konflik tata ruang pesisir;
- Peningkatan nilai tambah industri perikanan dan ekspor hasil laut;
- Peningkatan konsumsi ikan nasional untuk ketahanan pangan.

#### Rekomendasi

1. Perkuat ekonomi nelayan kecil melalui akses pembiayaan, perlindungan harga, dan kemudahan izin tangkap.
2. Evaluasi proyek-proyek reklamasi dan pemagaran pantai agar tidak merugikan masyarakat pesisir dan ekosistem laut.
3. Percepat modernisasi armada dan teknologi perikanan dengan fokus pada *eco-fishing* dan sistem tangkap berkelanjutan.
4. Perkuat penegakan hukum terhadap *illegal fishing* melalui kerja sama dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut.
5. Kembangkan industri hilir perikanan (cold storage, pengolahan hasil laut, logistik ekspor) agar nelayan tidak hanya bergantung pada tengkulak.
6. Lanjutkan dan perluas kampanye Gemarikan agar berdampak pada perubahan konsumsi nasional.
7. Bangun sistem pemantauan pesisir digital nasional untuk mengintegrasikan data ekologi, ekonomi, dan keamanan laut.
8. Dorong sinergi lintas kementerian dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Nusron Wahid Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

#### Program

1. Menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan keadaan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian.
2. Menyelesaikan persoalan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit.
3. Menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.
4. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Nusron Wahid**  
**Kementerian ATR/BPN**

### Program

5. Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada 2024.
6. Pemenuhan target 104 kantor pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada 2024
7. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
8. Menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

### Kategori Penilaian

2,81 (sedang)

### Faktor Positif

- Program sertifikasi tanah terus berjalan di sejumlah daerah, membantu masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah;
- Upaya digitalisasi pertanahan mulai dilakukan, terutama dalam proses pengecekan sertifikat dan pendaftaran tanah *online* (melalui Sentuh Tanahku);
- Adanya wacana penertiban tanah tidak produktif dan redistribusi aset menumbuhkan harapan akan revitalisasi reforma agraria nasional;
- Kementerian aktif dalam penyusunan kebijakan tata ruang nasional dan integrasi dengan proyek strategis seperti *One Map Policy* dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital;
- Koordinasi lintas kementerian mulai diarahkan untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Nusron Wahid**  
**Kementerian ATR/BPN**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Konflik agraria terus meningkat, terutama antara masyarakat adat dengan korporasi besar (sawit, tambang, properti);
  - Kasus mafia tanah masih marak dan belum ada langkah tegas yang sistematis;
  - Penerbitan sertifikat di wilayah pantai, pesisir, dan pulau kecil menimbulkan polemik hukum dan tudingan mal administrasi;
  - Program reforma agraria stagnan, lebih banyak wacana daripada implementasi nyata di lapangan;
- Kementerian dianggap pro-oligarki, karena lebih banyak berpihak pada kepentingan investasi dan pengembang besar daripada masyarakat kecil;
  - Wacana penyitaan tanah tidak produktif oleh negara dianggap prematur dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan;
  - Birokrasi masih lambat dan biaya pengurusan tanah mahal, sehingga reformasi pelayanan belum terasa di masyarakat;
  - Menteri dipersepsikan lebih banyak membuat pernyataan kontroversial ketimbang hasil nyata.



**Nusron Wahid**  
**Kementerian**  
**ATR/BPN**

## Aspek Penilaian dan Analisis

### Isu Strategis

- Reforma agraria dan redistribusi tanah nasional;
- Konflik agraria dan penyelesaian tanah adat/ulayat;
- Penegakan hukum terhadap mafia tanah;
- Tumpang tindih izin lahan dan tata ruang;
- Keadilan agraria dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan adat;
- Keterbukaan data dan digitalisasi pertanahan.

### Rekomendasi

1. Percepat implementasi Reforma Agraria sejati dengan redistribusi tanah yang berpihak kepada petani kecil, masyarakat adat, dan korban konflik agraria.
2. Bangun sistem transparansi pertanahan digital nasional (open land data) agar publik dapat mengawasi izin dan sertifikat lahan.
3. Tindak tegas mafia tanah dengan pendekatan hukum dan reformasi internal BPN di daerah.
4. Tegaskan batas wilayah dan status tanah adat/ulayat melalui kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah.
5. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan atau penggusuran warga.
6. Sederhanakan birokrasi dan biaya sertifikasi tanah agar mudah diakses oleh masyarakat bawah.
7. Fokus pada penyelesaian konflik pertanahan produktif seperti di Pulau Rempang, PIK 2, dan kawasan industri lainnya, dengan pendekatan partisipatif.
8. Pastikan wacana penyitaan tanah tidak produktif diikuti dengan aturan jelas dan mekanisme kompensasi yang adil.



**Rachmat Pambudy**  
**Kementerian Perencanaan**  
**Pembangunan Nasional/Badan**  
**Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Program**

1. Pembangunan manusia berkualitas (melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan karakter).
2. Infrastruktur berkualitas (konektivitas, transisi energi, IKN, dan pengelolaan sampah).
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan (menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan produk ramah lingkungan).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,92 (sedang)

##### Faktor Positif

- Program beasiswa LPDP tetap berjalan baik dan diperluas cakupannya, menjadi salah satu program unggulan yang mempertahankan kredibilitas kementerian dalam pengembangan SDM nasional;
- Perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) tetap terjaga kontinuitasnya, dengan upaya menyesuaikan target pembangunan jangka panjang.;

- Bappenas berperan penting dalam pengawasan dan evaluasi proyek strategis nasional (PSN), termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur dasar, dan SDGs;
- Upaya integrasi data dan kebijakan lintas sektor mulai dikembangkan untuk memperkuat evidence-based policy making;
- Kinerja teknokratik internal masih diakui, meskipun tidak sekuat masa lalu.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Kurangnya inovasi kebijakan dan terobosan strategis. Banyak kebijakan yang bersifat administratif, bukan substantif;
- Kualitas perencanaan dan koordinasi lintas kementerian dianggap menurun, tidak sekuat era-era sebelumnya (Bappenas dinilai bukan lagi “dapur intelektual” pemerintahan);
- *Overlapping* fungsi dengan kementerian lain (misalnya Kemenkeu, Kemenko, atau KemenPAN-RB), menyebabkan perannya tidak fokus;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan wilayah masih tinggi, menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan pembangunan manusia dan daerah;
- Proyeksi dan target pembangunan jangka panjang (RPJMN, SDGs, dan IKN) dinilai kurang realistis dan belum diikuti roadmap implementatif yang kuat;
- Kurangnya sosialisasi program dan komunikasi publik, membuat masyarakat tidak memahami peran nyata kementerian ini;
- Birokrasi internal masih lamban, dan kualitas SDM perencana dinilai tidak merata, dengan kompetensi sektoral yang lemah.



## Rachmat Pambudy Kementerian PPN/BPPN

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Efektivitas dan koordinasi perencanaan nasional antar-K/L dan daerah;
- Ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perdesaan;
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan daya saing SDM nasional;
- Evaluasi dan sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD daerah;
- Integrasi data pembangunan dan pengukuran berbasis hasil (*result-based monitoring*);
- Kelembagaan Bappenas sebagai pusat perencanaan independen dan teknokratik.

#### Rekomendasi

1. Pulihkan peran teknokratik Bappenas sebagai “otak perencanaan nasional” yang independen dan berbasis riset, bukan sekadar pelaksana program politik.
2. Perkuat koordinasi lintas sektor dan daerah agar perencanaan tidak tumpang tindih dan target pembangunan lebih realistis.
3. Dorong inovasi kebijakan berbasis data dan teknologi, misalnya dengan Big Data for Development atau Integrated Policy Dashboard.
4. Tingkatkan fokus pada pembangunan manusia berkualitas, dengan memperluas program beasiswa, pelatihan teknis, dan pemerataan akses pendidikan.
5. Susun perencanaan jangka panjang yang berorientasi keberlanjutan (*green & blue economy*) untuk menghadapi perubahan iklim dan transformasi digital global.
6. Perkuat mekanisme evaluasi hasil pembangunan (*impact evaluation*) agar kebijakan tidak berhenti pada laporan input-output.
7. Kembangkan reformasi kelembagaan internal agar Bappenas lebih lincah, digital, dan kolaboratif dengan universitas serta lembaga riset nasional.



**Rini Widyantini**

## **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

### **Program**

- 1.** Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045.
- 2.** Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
- 3.** Transformasi Digital dan SPBE.
- 4.** Penataan ASN dan pemindahan ke IKN.
- 5.** Struktur pemerintahan: Machinery of Government.
- 6.** Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital.
- 7.** Kompetensi ASN dan Penataan Tenaga Non-ASN.
- 8.** Penataan kelembagaan dan pengisian jabatan.
- 9.** Asistensi reformasi dan Zona Integritas.
- 10.** Roadmap dan Progres Transformasi Tahun 2026.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Rini Widyantini**

### **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

#### **Aspek Penilaian dan Analisis**

##### **Kategori Penilaian**

2,98 (sedang)

##### **Faktor Positif**

- Digitalisasi birokrasi mulai berkembang, dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, yang mempercepat akses layanan;
- Reformasi kepegawaian ASN dan PPPK mulai berjalan melalui penataan status kepegawaian honorer, rekrutmen berbasis kompetensi, serta sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lebih objektif;

- Komitmen peningkatan kompetensi ASN dan program pemindahan sebagian ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sinyal transformasi birokrasi jangka panjang;
- Adanya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 yang menjadi arah kebijakan jangka panjang untuk membangun birokrasi dinamis, adaptif, dan berdaya saing;
- Kementerian menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek akuntabilitas kinerja dan efisiensi anggaran.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Rini Widyantini**  
**Kementerian PAN RB**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Dampak nyata reformasi birokrasi belum dirasakan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan layanan publik lambat dan berbelit;
- Masih banyak birokrasi yang tidak efisien dan berorientasi melayani diri sendiri, bukan masyarakat (*self-serving bureaucracy*);
- Reformasi budaya kerja ASN stagnan, profesionalisme dan integritas belum meningkat secara merata;
- Kebijakan penataan ASN sering menimbulkan kebingungan, terutama terkait status dan hak PPPK, serta sistem karier pegawai non-PNS;
- Koordinasi antarkementerian/lembaga lemah, sehingga reformasi birokrasi terfragmentasi dan tidak konsisten antarinstansi;
- Kritik keras terhadap birokrasi politikus karena masih banyak jabatan tinggi publik dipenuhi oleh pertimbangan nonmerit;
- Transparansi dan partisipasi publik dalam reformasi birokrasi masih rendah;
- Digitalisasi birokrasi belum menjamin efisiensi, karena masih banyak sistem yang duplikatif dan tidak interoperabel antarinstansi;
- Reformasi cenderung dikendalikan secara politik, bukan profesional — menciptakan kesan birokrasi sebagai alat kekuasaan, bukan pelayanan publik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Rini Widyantini**  
**Kementerian**  
**PAN RB**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Reformasi sistem kepegawaian nasional (ASN & PPPK);
- Transformasi digital birokrasi (SPBE, layanan terintegrasi);
- Perubahan kultur kerja dan profesionalisme ASN;
- Efisiensi birokrasi di tengah tekanan anggaran;
- Meritokrasi dan depolitisasi jabatan publik;
- Akuntabilitas dan pengawasan internal.

#### Rekomendasi

1. Percepat pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dengan fokus pada hasil (*impact-oriented*), bukan sekadar proses.
2. Bangun budaya pelayanan publik proaktif dan adaptif, melalui pelatihan kepemimpinan transformasional ASN dan indikator kinerja berbasis hasil pelayanan.
3. Perkuat meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi ASN, bebas dari intervensi politik dan nepotisme.
4. Pastikan integrasi digital antarinstansi melalui interoperabilitas sistem SPBE dan penyederhanaan prosedur layanan *online*.
5. Berikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi ASN PPPK, termasuk sistem karier yang jelas dan transparan.
6. Lakukan audit reformasi birokrasi sektoral, untuk mengukur kemajuan tiap kementerian/lembaga dan mencegah stagnasi.
7. Dorong penguatan peran masyarakat dalam mengawasi kinerja birokrasi, melalui kanal aduan publik digital yang responsif.
8. Dekatkan reformasi birokrasi ke daerah, dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, akuntabilitas, dan digitalisasi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Wihaji**

### **Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

#### **Program**

- 1.** Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
- 2.** Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak).
- 3.** GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).
- 4.** Sidaya (Lansia Berdaya).
- 5.** *Super App* Keluarga (Platform Digital Terintegrasi).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Wihaji**  
**Kementerian KPK/BKKBN**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,92 (sedang)

#### Faktor Positif

- Program penurunan *stunting* menjadi *flagship* kementerian ini dan mendapat perhatian luas; upaya kolaboratif lintas sektor dengan Kemenkes, Kemendagri, dan Bappenas dinilai positif;
- Pemanfaatan teknologi digital melalui Super Apps kependudukan dan keluarga mulai diperkenalkan sebagai inovasi pelayanan publik berbasis data;

- Perbaikan data kependudukan dan keluarga dinilai memperkuat basis kebijakan sosial dan pembangunan manusia;
- Pendekatan keluarga dan edukasi reproduksi sehat mulai diperluas melalui kampanye nasional, termasuk program “Bangga Kencana” dan “Kampung Keluarga Berkualitas;”
- Integrasi kebijakan *stunting* ke dalam program pembangunan nasional membuat kementerian ini lebih strategis dalam konteks Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, terutama pada pilar peningkatan SDM unggul.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Wihaji**  
**Kementerian KPK/BKKBN**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Implementasi program digital (Super Apps, SIGA) belum merata; banyak daerah belum memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan aplikasi secara optimal;
- Pendekatan program terlalu *top-down*, belum berbasis kebutuhan dan partisipasi keluarga di tingkat akar rumput;
- Program penurunan *stunting* masih melanjutkan pola lama, belum menunjukkan inovasi signifikan dibanding era sebelumnya;
- Belum ada program kuat untuk remaja dan generasi muda (12–20 tahun), padahal kelompok ini krusial dalam pembangunan keluarga berencana jangka panjang;
- Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah masih lemah, menyebabkan target *stunting* dan ketahanan keluarga tidak konsisten antarwilayah;
- Keterlibatan publik dan sektor swasta dalam kampanye kependudukan masih rendah.



**Wihaji**  
**Kementerian**  
**KPK/BKKBN**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Percepatan penurunan *stunting* nasional;
- Peningkatan kualitas dan integrasi data;
- Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kependudukan dan KB;
- Bonus demografi dan pembangunan keluarga berketahanan;
- Edukasi remaja dan kesehatan reproduksi;
- Peningkatan kapasitas petugas lapangan KB dan kader keluarga.

#### Rekomendasi

1. Perluas jangkauan dan sosialisasi program Super Apps dan GENTING secara masif ke daerah 3T, agar digitalisasi benar-benar inklusif.
2. Kembangkan pendekatan partisipatif berbasis keluarga dan komunitas, bukan hanya kampanye nasional *top-down*.
3. Perkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, terutama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial, agar intervensi *stunting* lebih terintegrasi.
4. Luncurkan program generasi muda “Pra Keluarga Sehat” untuk remaja usia 12–20 tahun, fokus pada kesehatan mental, reproduksi, dan kesiapan membangun keluarga.
5. Modernisasi sistem data kependudukan dan keluarga berbasis interoperabilitas, agar tidak tumpang tindih dengan Dukcapil.
6. Kuatkan peran BKKBN sebagai lembaga strategis pengendalian penduduk nasional, bukan sekadar pelaksana program *stunting*.
7. Integrasikan pengelolaan data kependudukan dengan program sosial dan pendidikan, misalnya dalam bantuan sosial dan beasiswa keluarga miskin.
8. Kembangkan model komunikasi publik yang inovatif, termasuk kampanye sosial berbasis influencer, sekolah, dan komunitas lokal untuk isu keluarga dan *stunting*.



**Hanif Faisol Nurofiq**

## **Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**

### **Program**

- 1.** Pengelolaan sampah plastik.
- 2.** Pengendalian polusi air dan udara.
- 3.** Konservasi keanekaragaman hayati.
- 4.** Penegakan hukum lingkungan.
- 5.** Aksi iklim dan ekonomi hijau.
- 6.** Keterlibatan masyarakat dan aksi kolaboratif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Hanif Faisol Nurofiq Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,92 (sedang)

##### Faktor Positif

- Kampanye hijau dan anti-polusi cukup aktif di ruang publik (kota hijau, gerakan tanam pohon, edukasi masyarakat);
- Inisiatif pengelolaan sampah mulai berkembang: munculnya bank sampah di sekolah dan komunitas menjadi contoh kesadaran baru di masyarakat;
- Koordinasi dengan daerah dalam pengelolaan limbah dan sampah mulai tampak, meski belum optimal;
- Program pengendalian perubahan iklim dan emisi karbon masih berjalan melalui kerja sama internasional dan target NDC;
- Ada kesadaran komunikasi publik lewat kampanye kesadaran lingkungan, meski efeknya belum luas.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Hanif Faisol Nurofiq Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Penegakan hukum lingkungan lemah. Banyak kasus pencemaran dan kerusakan alam (terutama tambang dan deforestasi) tidak ditindak tegas;
- Kerusakan lingkungan meningkat, terutama akibat proyek pertambangan dan ekspansi industri ekstraktif;
- Polusi udara memburuk di wilayah perkotaan besar, tanpa solusi struktural yang jelas;
- Kebijakan pengelolaan sampah nasional tidak terintegrasi, masih terfragmentasi antarlembaga;
- Kementerian belum memperlihatkan keberpihakan yang tegas pada lingkungan dibanding kepentingan ekonomi;
- Tidak ada terobosan kebijakan baru untuk mengurangi limbah plastik, mendorong ekonomi hijau, atau memperluas konservasi ekosistem;
- Program penanganan sampah plastik belum menyentuh akar produksi industri (hanya menekankan daur ulang, bukan pengurangan sumber limbah);
- Kinerja terkesan “*as usual*”, ada aktivitas, tapi tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan lingkungan secara nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Hanif Faisol Nurofiq**  
**Kementerian LH/BPLH**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan (tambang, limbah industri, deforestasi);
- Polusi udara dan pengendalian emisi karbon perkotaan;
- Pengelolaan sampah plastik nasional dan *circular economy*;
- Integrasi kebijakan lingkungan pusat dan daerah;
- Kesiapsiagaan terhadap krisis iklim dan bencana ekologis.

### Rekomendasi

1. Tegakkan hukum lingkungan secara tegas dan terbuka, termasuk publikasi daftar perusahaan pelanggar
2. Bangun kebijakan nasional pengelolaan sampah terpadu, bukan parsial per daerah.
3. Hentikan izin tambang di kawasan ekosistem kritis dan prioritaskan rehabilitasi paska tambang.
4. Fokuskan regulasi pada pengurangan sumber plastik, bukan sekadar daur ulang.
5. Bangun sinergi KLH dengan ESDM, Bappenas, dan Pemda dalam kebijakan transisi energi hijau dan tata ruang ekologis.
6. Kembangkan sistem digital monitoring kualitas udara, air, dan hutan, agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
7. Dorong partisipasi masyarakat dan pelajar dalam gerakan lingkungan berbasis komunitas, memperkuat pendidikan ekologi sejak dini.
8. Perkuat posisi politik KLH sebagai lembaga independen yang berani menolak kebijakan pembangunan destruktif.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Rosan Roeslani Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

#### Program

1. Green investment, hilirisasi, dan transisi energi berkelanjutan.
2. Infrastruktur konektivitas dan investasi berbasis ekspor.
3. Ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan.
4. Sektor prioritas untuk prioritas investor, termasuk IKN.
5. Peta jalan hilirisasi investasi strategis.
6. Simplifikasi regulasi dan dukungan perizinan.
7. UMKM dan ekonomi digital sebagai mitra strategis.
8. Target investasi 2025: Rp1.905–2.000 triliun.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Rosan Roeslani Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

3,09 (sedang)

##### Faktor Positif

- Kampanye hilirisasi dan investasi terus digalakkan di tingkat nasional dan internasional sebagai strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam (nikkel, bauksit, dan mineral strategis lainnya);
- Upaya mendorong investasi di sektor digital dan ekonomi hijau mulai terlihat, termasuk proyek energi terbarukan dan industri baterai kendaraan listrik;
- Program percepatan perizinan investasi (OSS-RBA) masih menjadi instrumen positif yang diakui mempermudah investor besar;
- Kementerian aktif dalam diplomasi ekonomi luar negeri, terutama dengan negara-negara BRICS, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok, untuk menarik investasi strategis.;
- Sinergi awal dengan Danantara Indonesia (*holding* BUMN investasi) menjadi fondasi kelembagaan baru dalam transformasi investasi jangka panjang.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Rosan Roeslani** **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal**

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Target investasi nasional 2025 (Rp1.905 triliun) dinilai sulit tercapai; hingga pertengahan tahun, realisasi belum mencapai 60%;
- Kinerja kementerian dinilai tidak jelas dan tumpang tindih dengan fungsi Kementerian Koordinator Perekonomian dan BUMN;
- Minim transparansi dan sosialisasi program, banyak masyarakat tidak memahami peran atau capaian kementerian ini;
- Proyek hilirisasi dianggap elitis dan tidak inklusif, hanya menguntungkan kelompok industri besar tanpa dampak nyata bagi UMKM dan masyarakat lokal;
- Aspek lingkungan dan tata kelola investasi diabaikan, banyak proyek hilirisasi yang menimbulkan konflik lahan dan pencemaran (terutama di sektor tambang);
- Regulasi investasi belum stabil dan sering berubah, menyebabkan kebingungan investor dan menurunkan kepercayaan pasar;
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga rendah, menyebabkan hambatan pada proyek strategis nasional.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Rosan Roeslani Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Isu Strategis

- Kegagalan mencapai target investasi nasional 2025;
- Kinerja hilirisasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan;
- Peningkatan nilai tambah industri nasional;
- Koordinasi lintas kementerian dan sinkronisasi dengan Danantara, BUMN, dan Kementerian Perindustrian;
- Perlindungan investor kecil dan dukungan terhadap UMKM.

#### Rekomendasi

- 1. Perkuat tata kelola investasi berbasis keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya target nominal.
- 2. Sinkronkan kebijakan hilirisasi dengan sektor industri, lingkungan, dan energi, agar tidak menimbulkan konflik atau kerusakan ekologis.
- 3. Dorong investasi inklusif bagi UMKM dan daerah 3T, melalui kemitraan industri besar dengan koperasi dan pelaku lokal.
- 4. Tingkatkan transparansi data investasi, termasuk capaian, kendala, dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
- 5. Percepat kepastian hukum dan stabilitas regulasi, agar investor memiliki kepercayaan jangka panjang.
- 6. Bangun sistem pengawasan lingkungan dan sosial untuk proyek hilirisasi, agar tidak memperburuk ketimpangan wilayah dan kerusakan alam.
- 7. Perkuat kapasitas daerah dalam promosi dan fasilitasi investasi, karena sebagian besar proyek investasi kini bersifat desentralistik.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Ferry Juliantono**

# Kementerian Koperasi

## Program

1. Suplai bahan pokok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Penyaluran pupuk murah melalui koperasi.
3. Penyaluran beras melalui kerja sama dengan Bulog.
4. Penguatan produksi tekstil koperasi (Pakaian Anak 0–12 tahun).
5. Suplai bahan baku untuk perumahan rakyat.
6. Pengelolaan sumur minyak rakyat.
7. Produksi minyak untuk rakyat (Hilirisasi Sawit).
8. Produksi energi biomassa ramah lingkungan.
9. Suplai susu nasional.
10. Pengembangan koperasi ojek *online*.
11. Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD).
12. Penghapusan KUT (Hapus Buku & Tagih Kredit Usaha Tani).

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Ferry Juliantono**  
**Kementerian Koperasi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,90 (sedang)

#### Faktor Positif

- Kemenkop tetap konsisten menjalankan peran regulator dan katalisator koperasi nasional, menunjukkan kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya;
- Program revitalisasi KUD dan koperasi pangan di beberapa daerah mulai berjalan, terutama yang terkait pasokan pupuk dan pangan murah;

- Upaya reformasi kelembagaan koperasi dan verifikasi koperasi fiktif telah dimulai di sejumlah provinsi;
- Koperasi Merah Putih sebagai konsep baru koperasi nasional menunjukkan niat pemerintah membangun koperasi berskala besar dan kompetitif;
- Kementerian ini memiliki potensi besar untuk mendorong UMKM dan ekonomi gotong royong jika fokus pada pemberdayaan anggota dan efisiensi distribusi produk lokal.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Ferry Juliantono**  
**Kementerian Koperasi**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Kinerja belum terlihat nyata dan minim dampak langsung ke masyarakat. Banyak program bersifat retorik dan seremonial;
- Program Koperasi Merah Putih belum berjalan efektif, dan bahkan belum jelas model operasional serta mekanisme partisipasi anggotanya;
- Kasus dugaan judi *online* dan masalah etika pejabat mencoreng kredibilitas kementerian;
- Koordinasi lemah dengan kementerian lain (misalnya Kementerian Pertanian dan Perdagangan) membuat program koperasi pangan, susu, dan ojek *online* tidak terintegrasi;
- Banyak koperasi fiktif atau tidak sehat masih beroperasi tanpa pengawasan ketat;
- Kurangnya sosialisasi dan transparansi mengenai capaian program ke publik;
- Orientasi kebijakan terkesan top-down, seperti masa Orde Baru, tanpa mendorong kemandirian anggota;
- Tidak ada inovasi digital koperasi nasional, padahal sektor ini dapat menjadi motor ekonomi rakyat di era ekonomi digital.



## Ferry Juliantono Kementerian Koperasi

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Kinerja Koperasi Merah Putih dan revitalisasi koperasi pangan;
- Reformasi kelembagaan koperasi dan tata kelola keuangan;
- Pengawasan koperasi fiktif dan audit berbasis data nasional;
- Peningkatan integrasi koperasi dengan rantai pasok industri pangan dan energi;
- Digitalisasi koperasi dan penguatan koperasi milenial;
- Pengembalian kepercayaan publik pasca isu integritas pejabat.

#### Rekomendasi

1. Bangun sistem koperasi nasional berbasis data dan digitalisasi (Koperasi Digital Nasional) untuk mengintegrasikan data anggota, keuangan, dan transaksi.
2. Luncurkan audit nasional koperasi untuk menertibkan koperasi fiktif dan tidak sehat
3. Perjelas arah dan struktur Koperasi Merah Putih agar tidak hanya menjadi slogan politik.
4. Perkuat kemitraan koperasi dengan sektor pertanian, transportasi, dan energi, khususnya koperasi ojek *online* dan koperasi pupuk.
5. Kembalikan prinsip koperasi sebagai alat pemerataan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar instrumen ekonomi formal.
6. Lakukan reformasi kepemimpinan dan etika pejabat, agar kementerian ini kembali dipercaya publik.
7. Dorong koperasi pemuda dan koperasi digital berbasis platform, agar sektor ini relevan dengan generasi baru.
8. Fokus pada pelatihan manajemen koperasi dan literasi keuangan di desa dan kota kecil untuk memperkuat daya saing ekonomi rakyat.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

**Maman Abdurrahman**

# Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



### Program

1. SAPA UMKM – Super Ekosistem Terintegrasi
2. Kartu Usaha (Produktif & Afirmatif)
3. Transformasi Usaha Mikro (*In formalization* & Sertifikasi)
4. Redesain PLUT-KUMKM menjadi *Center of Excellence*
5. *Holding* UMKM
6. Penghapusan Piutang UMKM
7. *Business Matching* & Keterlibatan UMKM dalam Program Pemerintah
8. Perluasan Akses Pembiayaan & Investasi
9. *Entrepreneur Hub* & Inkubasi Usaha
10. Layanan Pendampingan dan Konsultasi Usaha Terintegrasi
11. Transformasi Digital dan Peningkatan SDM
12. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan Rasio Wirausaha

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Maman Abdurrahman Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,91 (sedang)

##### Faktor Positif

- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai masih menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM di berbagai daerah.
- Dorongan terhadap digital entrepreneurship dan wirausaha muda mulai meningkat, terutama melalui pelatihan dan program e-commerce lokal.
- Upaya digitalisasi UMKM membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar secara *online*.
- Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain (misalnya BUMN dan Kominfo) dalam pelatihan kewirausahaan menjadi langkah awal yang baik.
- Kementerian mulai mengkampanyekan UMKM naik kelas dan *go global* melalui pameran internasional dan program kemitraan.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Maman Abdurrahman Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Belum ada terobosan kebijakan besar yang berdampak langsung terhadap daya saing dan kapasitas UMKM nasional.
- Pendampingan UMKM sangat minim, terutama bagi usaha mikro di desa dan sektor informal.
- Program-program tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga pelaku usaha banyak yang tidak mengetahui skema bantuan yang tersedia.
- Akses pembiayaan nonbank masih terbatas, banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat formal KUR.
- *Overlapping* kebijakan dengan Kementerian Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih program.
- Anggaran kementerian dinilai terlalu kecil dibanding skala target (lebih dari 70 juta UMKM di Indonesia).
- Belum ada kebijakan nyata untuk mengurangi ketimpangan antarlevel UMKM (mikro–menengah).
- Digitalisasi masih terbatas pada kota besar, belum menjangkau UMKM di daerah tertinggal.
- Tidak ada reformasi struktural dalam rantai pasok dan perlindungan pasar domestik untuk produk lokal.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Maman Abdurrahman**  
**Kementerian UKM**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Transformasi UMKM dari sektor informal ke formal.
- Akses permodalan dan pembiayaan nonbank.
- Pendampingan berkelanjutan dan pelatihan kewirausahaan berbasis daerah.
- Inklusi digital dan e-commerce untuk UMKM desa.
- Harmonisasi kebijakan antarkementerian.
- Strategi ekspor dan go global UMKM.

#### Rekomendasi

1. Bangun ekosistem pendampingan UMKM terpadu, melibatkan perguruan tinggi, BUMN, dan swasta.
2. Perluas pembiayaan inovatif (*crowdfunding*, modal ventura mikro, *fintech syariah*) agar tidak hanya bergantung pada KUR.
3. Integrasikan data UMKM nasional melalui sistem digital tunggal untuk memudahkan perencanaan, bantuan, dan pengawasan.
4. Dorong kemitraan UMKM dengan industri besar dan BUMN, terutama dalam rantai pasok lokal.
5. Perkuat literasi digital dan pemasaran *online* untuk UMKM di luar Jawa.
6. Luncurkan insentif pajak dan pelatihan gratis bagi UMKM yang mampu ekspor atau menyerap tenaga kerja baru.
7. Sederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro, agar pelaku usaha mudah formal dan terlindungi.
8. Fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemuda pelaku UMKM, karena mereka merupakan mayoritas pelaku sektor ini.



Widiyanti Putri

## Kementerian Pariwisata

### Program

1. Tourism 5.0 – Transformasi Digital Pariwisata
2. Gerakan Wisata Bersih
3. Pariwisata Naik Kelas (*Gastro, Marine, dan Wellness*)
4. *Event* Berbasis *Intellectual Property* (IP) Indonesia
5. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas
6. Peningkatan Kualitas SDM dan *Grand Strategy*
7. Pengelolaan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Widiyanti Putri**  
**Kementerian Pariwisata**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Kategori Penilaian

2,91 (sedang)

#### Faktor Positif

- Beberapa destinasi wisata prioritas (Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Borobudur) tetap menjadi magnet wisatawan domestik dan internasional.
- Program Desa Wisata dan pengembangan ekonomi kreatif lokal mulai tumbuh di sebagian wilayah, terutama daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

- Sektor pariwisata kembali pulih pascapandemi, dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik sejak awal pemerintahan baru.
- Upaya promosi digital dan kolaborasi lintas platform internasional (Traveloka, TikTok, YouTube) menjadi langkah positif meski belum optimal.
- Dukungan terhadap *event-event* nasional dan internasional seperti konser dan festival budaya membantu pemulihan sektor pariwisata.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Widiyanti Putri**  
**Kementerian Pariwisata**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Kepemimpinan menteri dinilai tidak mencerminkan profesionalisme dan empati publik. Gaya hidup mewah dan sikap kontroversial justru menurunkan kepercayaan publik.
- Minim terobosan kebijakan strategis. Program berjalan rutin dan administratif, tanpa inovasi baru dalam tata kelola destinasi maupun digitalisasi pariwisata.
- Distribusi program tidak merata. Pembangunan Desa Wisata hanya terpusat di daerah tertentu, sedangkan ribuan desa lain tidak tersentuh.
- Koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dengan Kementerian PU, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup, yang menyebabkan ketidaksinergisan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata.
- Ketergantungan tinggi pada *event* besar dan destinasi elite (Bali, Mandalika, dll) menyebabkan daerah lain kurang mendapatkan perhatian dan promosi.
- Belum ada strategi serius untuk pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Banyak proyek dinilai merusak lingkungan dan tidak berpihak pada masyarakat lokal.
- Sosialisasi program sangat minim, publik tidak memahami arah kebijakan kementerian secara utuh.



## Widiyanti Putri Kementerian Pariwisata

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Profesionalisme dan kredibilitas kepemimpinan menteri.
- Pemerataan pembangunan destinasi wisata dan desa wisata.
- Penguatan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Pemberdayaan masyarakat lokal di sektor pariwisata.
- Diversifikasi pasar wisata (tidak bergantung pada Bali dan *event* besar).
- Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

#### Rekomendasi

1. Reformasi kepemimpinan dan manajemen strategis kementerian agar lebih fokus pada pelayanan publik dan keberpihakan terhadap pelaku pariwisata kecil.
2. Perluas program Desa Wisata Partisipatif berbasis potensi lokal di setiap provinsi, bukan hanya di destinasi unggulan.
3. Dorong pengembangan *sustainable tourism* dengan indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi yang jelas.
4. Perkuat koordinasi lintas sektor (PU, Perhubungan, Lingkungan, UMKM) agar pariwisata berbasis infrastruktur dan pemberdayaan rakyat.
5. Digitalisasi promosi dan manajemen wisata melalui *tourism big data* dan integrasi aplikasi pariwisata nasional.
6. Fokus pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pariwisata lokal untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing internasional.
7. Hentikan pendekatan pariwisata berbasis *event* dan seremonial, ganti dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat sekitar destinasi.



**Teuku Riefky Harsya**

## **Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif**

### **Program**

- 1.** Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 2.** Peningkatan Kapasitas dan Lapangan Kerja
- 3.** Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Produk Kreatif
- 4.** Ekonomi Kreatif sebagai "*The New Engine of Growth*"

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Teuku Riefky Harsya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,88 (sedang)

##### Faktor Positif

- Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis digital (konten, e-commerce, desain, musik, film, game) cukup pesat dan menjadi kontributor signifikan terhadap PDB nasional.
- Kolaborasi dengan marketplace dan startup digital mendorong ekspor produk kreatif lokal.
- Upaya pengembangan talenta muda kreatif melalui pelatihan, festival, dan inkubasi (misal: *Creative Hub*, *Indonesian Creative District Network*).
- Potensi sinergi dengan sektor ekonomi halal, pariwisata, dan UMKM mulai diidentifikasi sebagai peluang pertumbuhan baru.
- Fokus pada subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya membantu menjaga daya saing global.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### **Teuku Riefky Harsya** **Kementerian Ekonomi Kreatif/** **Badan Ekonomi Kreatif**

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Faktor Negatif

- Kurangnya kebijakan struktural dan terobosan besar. Banyak program bersifat kampanye, belum menjadi kebijakan ekonomi yang berdampak jangka panjang.
- Sosialisasi dan komunikasi publik sangat minim, sehingga masyarakat umum tidak memahami arah kebijakan ekonomi kreatif.
- Koordinasi lintas sektor lemah. Sinergi dengan Kementerian Perdagangan, UMKM, dan Pendidikan belum optimal.
- Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) lemah, banyak kreator digital kehilangan potensi karena pembajakan dan kurangnya dukungan hukum.
- Minimnya dukungan pembiayaan kreatif. Akses pendanaan, insentif pajak, dan kredit lunak bagi pelaku industri kreatif masih terbatas.
- Kelembagaan kementerian kurang menonjol.
- Belum ada kebijakan nasional yang mengintegrasikan data dan potensi ekonomi kreatif antarwilayah.
- Kementerian masih terkesan elitis dan terpusat di kota besar, padahal potensi ekonomi kreatif tersebar di daerah.



## Teuku Riefky Harsya Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Arah kebijakan dan *roadmap* ekonomi kreatif nasional (2025–2030).
- Penguatan HKI dan perlindungan karya kreator lokal.
- Akses pembiayaan dan investasi industri kreatif.
- Sinergi dengan sektor ekonomi digital dan halal.
- Pemerataan ekosistem kreatif hingga tingkat daerah.
- Transformasi digital dan adaptasi AI dalam industri kreatif.

### Rekomendasi

1. Perkuat koordinasi antarlembaga ekonomi dan pendidikan untuk membangun ekosistem kreatif nasional yang terintegrasi.
2. Bangun sistem pembiayaan kreatif nasional (*Creative Fund*) agar pelaku kreatif mudah mendapatkan modal kerja dan investasi.
3. Percepat pembentukan *Creative Data Hub* nasional untuk memetakan potensi, produk, dan tenaga kerja kreatif di seluruh Indonesia.
4. Luncurkan program perlindungan HKI dan antipembajakan digital dengan mekanisme hukum yang kuat.
5. Dorong kolaborasi lintas sektor—UMKM, digital, budaya, dan teknologi—agar industri kreatif naik kelas.
6. Fokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif daerah, terutama sektor kuliner, kerajinan, dan musik lokal.
7. Integrasikan kebijakan ekonomi kreatif dalam kurikulum pendidikan vokasi dan universitas.
8. Bangun diplomasi ekonomi kreatif internasional, misalnya pameran global untuk produk desain, film, dan *game* lokal.



Arifatul Choiri Fauzi

## Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Program

1. Ruang Bersama Indonesia (RBI)
2. Perluasan Layanan *Call Center* “Sahabat Perempuan dan Anak” (SAPA) 129
3. Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa
4. Layanan Perlindungan Korban
5. Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
6. Penguatan Regulasi, Data Digital, dan Sistem Informasi
7. Pemanfaatan DAK Fisik & Nonfisik PPA
8. Sinergi Kebijakan Lintas Sektor & Komunitas

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Arifatul Choiri Fauzi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

2,98 (sedang)

##### Faktor Positif

- Program KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) dan Satu Data Perempuan dan Anak menunjukkan adanya arah kebijakan yang konsisten dan berbasis indikator terukur.
- Kerja sama aktif dengan NGO lokal dan internasional dinilai sebagai kekuatan KemenPPPA, terutama dalam advokasi hak perempuan, perlindungan

anak, dan kesetaraan gender.

- Layanan *Call Center* SAPA 129 menjadi kanal pengaduan penting bagi korban kekerasan, terutama di perkotaan.
- Program edukasi kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan dinilai sebagai langkah progresif meski masih terbatas dampaknya.
- Kementerian tetap menjaga kesinambungan program pemerintahan sebelumnya, sehingga keberlanjutan kebijakan tetap terjaga.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Arifatul Choiri Fauzi**  
**Kementerian PPPA**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Kurang terlihatnya hasil nyata dan gebrakan besar. Program berjalan rutin tanpa inovasi baru yang menonjol.
- Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap tinggi, menunjukkan lemahnya dampak preventif kebijakan.
- Pelaksanaan program KLA dan SAPA belum merata, hanya efektif di daerah dengan dukungan pemerintah lokal yang kuat.
- Minimnya anggaran membuat ruang gerak kementerian sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap donor dan kolaborator tinggi.
- Kurangnya koordinasi dengan sektor lain (pendidikan, sosial, hukum, digital) menyebabkan isu perempuan dan anak tidak terintegrasikan dalam kebijakan lintas kementerian.
- Isu anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan kekerasan siber terhadap anak (*cyberbullying*) belum mendapatkan perhatian serius.
- Banyak regulasi dan aplikasi digital tidak praktis bagi daerah dan desa, menambah beban administrasi tanpa dampak nyata di tingkat akar rumput.



**Arifatul Choiri Fauzi**  
**Kementerian PPPA**

## Aspek Penilaian dan Analisis

### Isu Strategis

- Pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan digital.
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan jabatan publik.
- Penguatan layanan pengaduan dan penegakan hukum bagi korban.
- Integrasi kebijakan gender di seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
- Kesiapan menghadapi dampak sosial-ekonomi terhadap perempuan pasca pandemi dan efisiensi anggaran.

## Rekomendasi

1. Perkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar isu perempuan-anak menjadi agenda lintas sektor, bukan hanya urusan PPPA.
2. Tingkatkan kapasitas lembaga layanan pengaduan dan rehabilitasi korban (termasuk di desa dan daerah terpencil).
3. Dorong anggaran afirmatif untuk program kesetaraan gender dan perlindungan anak, agar tidak hanya bergantung pada NGO.
4. Perkuat SAPA 129 dengan jaringan cepat tanggap (*quick response teams*) di tingkat provinsi dan kabupaten.
5. Integrasikan isu perempuan dan anak dalam kebijakan pendidikan, hukum, dan digitalisasi.
6. Kembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis komunitas, agar perempuan berdaya secara finansial dan sosial.
7. Evaluasi efektivitas program digitalisasi PPPA, pastikan aplikasi dan data benar-benar membantu masyarakat, bukan sekadar administrasi.
8. Kampanyekan nilai kesetaraan dan anti-kekerasan melalui media populer dan *influencer*, untuk menjangkau masyarakat luas.



**Erick Thohir**

## **Kementerian Pemuda dan Olahraga**

### **Program**

- 1.** Pengembangan Karakter dan Kepeloporan
- 2.** Kesiapan Pemuda di Era Baru
- 3.** Performa Atlet di Ajang Internasional
- 4.** Dukungan untuk SEA Games 2025
- 5.** Penyelenggaraan *Event* Olahraga Internasional
- 6.** Efisiensi Anggaran

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



### Erick Thohir Kementerian Pemuda dan Olahraga

#### Aspek Penilaian dan Analisis

##### Kategori Penilaian

3,03 (sedang)

##### Faktor Positif

- Beberapa cabang olahraga (misalnya sepak bola, voli, dan panjat tebing) mengalami peningkatan prestasi dan sering menyelenggarakan *event* internasional.
- Program penguatan kualitas pemuda melalui pelatihan wirausaha, kepemimpinan, dan digitalisasi mulai terlihat di sejumlah daerah.
- Kegiatan keolahragaan nasional berjalan dengan cukup baik secara teknis dan organisasi.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Erick Thohir**  
**Kementerian Pemuda**  
**dan Olahraga**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Faktor Negatif

- Prestasi olahraga nasional secara umum stagnan, bahkan menurun di cabang unggulan seperti bulu tangkis dan atletik.
- Tidak ada program unggulan yang benar-benar menonjol, baik dalam pembinaan atlet muda maupun pemberdayaan pemuda.
- Pemberantasan judi *online* (judol), narkoba, dan perilaku destruktif remaja tidak ditangani secara sistematis meski menjadi isu besar.
- Kemenpora terlalu fokus pada kegiatan seremonial dan *event*, bukan pembangunan sistem pembinaan olahraga jangka panjang.
- Koordinasi dengan KONI, KOI, dan lembaga kepemudaan lainnya lemah, sering terjadi tumpang tindih kebijakan.
- Anggaran cenderung tidak efisien dan tidak berorientasi pada hasil (*performance-based budgeting*).
- Kinerja kepemudaan tidak menyentuh akar persoalan anak muda masa kini seperti digitalisasi, lapangan kerja, dan krisis kesehatan mental.

## Kinerja Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran



**Erick Thohir**  
**Kementerian Pemuda**  
**dan Olahraga**

### Aspek Penilaian dan Analisis

#### Isu Strategis

- Reformasi sistem pembinaan atlet nasional dari hulu ke hilir.
- Pemberdayaan ekonomi dan sosial generasi muda.
- Penanganan darurat sosial pemuda: judi *online*, narkoba, dan kekerasan digital.
- Kesejahteraan dan jaminan sosial bagi atlet.
- Keadilan anggaran antarcabang olahraga (tidak hanya sepak bola).
- Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional.

#### Rekomendasi

1. Bangun sistem pembinaan atlet nasional terintegrasi dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional, dengan pengawasan independen.
2. Prioritaskan pembinaan atlet muda dan jaminan pasca karier atlet.
3. Kembangkan Gerakan Nasional Kepemudaan Produktif — mengintegrasikan wirausaha muda, digital *skill*, dan kerja sosial.
4. Tingkatkan peran Kemenpora dalam pencegahan judi *online*, narkoba, dan radikalisme digital di kalangan anak muda.
5. Perkuat sinergi lintas kementerian (Pendidikan, Kominfo, Sosial, Koperasi) agar kebijakan pemuda tidak terfragmentasi.
6. Fokus pada data dan riset kepemudaan, agar kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
7. Perbaiki tata kelola anggaran olahraga dan transparansi sponsor, untuk mencegah politisasi dan korupsi.
8. Dorong keseimbangan antara olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, agar olahraga menjadi gaya hidup nasional, bukan sekadar *event* kompetisi.

04

## Kesimpulan dan Rekomendasi

## Kesimpulan Umum

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang (3,07). Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang.

Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan penggantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3,16), Demokrasi dan Kebebasan (3,14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3,12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3,09), dan Stabilitas Harga Barang (3,00).

## Kesimpulan Umum

Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik. Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik. Karena masih berada di tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN.

## Kesimpulan Umum

Terkait kinerja kementerian, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08). Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3,0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Mereka adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan nonpolitik cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.

## 8 (delapan) Rekomendasi Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

01. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan dan kebijakan antikorupsi, termasuk melakukan reformasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan sistem peradilan, serta melakukan transparansi atas pengadaan barang publik di berbagai Kementerian.
02. Mendorong reformasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara substantif, dengan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, menghentikan kriminalisasi terhadap para aktivis, dan membangun sistem hukum yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi.
03. Fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif, melakukan reformasi regulasi investasi, dan pemberdayaan UMKM berbasis teknologi serta ekonomi hijau.
04. Memperluas program sosial berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*) dengan mengintegrasikan data sosial lintas lembaga (BPS, Kemensos, Kemendes) untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

## 8 (delapan) Rekomendasi Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

05. Melakukan reformasi pendidikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional, pemerataan digitalisasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
06. Mempercepat transisi energi dan reformasi lingkungan, dengan memperkuat kebijakan energi hijau, menghentikan tambang destruktif, dan mendorong inovasi teknologi energi terbarukan berdasarkan peta jalan yang jelas.
07. Meningkatkan komunikasi publik, membuka diri terhadap kritik, dan melibatkan publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
08. Memastikan kerja sama dan sinergi lintas Kementerian berjalan dengan baik, menghindari ego sektoral, dan mendorong kepemimpinan yang berbasis kinerja serta integritas moral.





Menara 165 Lt 4,  
Jalan TB Simatupang Kav 1,  
Jakarta Selatan

[www.indostrategi.id](http://www.indostrategi.id)  
[contact@indostrategi.id](mailto:contact@indostrategi.id)  
(+62) 857 8177 7125